



MEDIAKEUANGAN

T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

KEJAR RASIO OPTIMAL

Pajak berperan vital dalam perekonomian. Namun, rasio pajak Indonesia belum dalam kondisi ideal. Sejumlah strategi dijalankan guna mencapai rasio pajak paling realistis dan aman bagi perekonomian.



Daftar Isi



Edisi bulan Maret ini, Media Keuangan mengangkat isu *tax ratio*. Saat ini Indonesia masih berupaya meningkatkan *tax ratio* menuju angka yang ideal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui perbaikan regulasi dan administrasi perpajakan. Upaya untuk mengejar *tax ratio* ini kami gambarkan dengan seseorang yang sedang melaju menuju sebuah target optimal namun tetap mempertimbangkan potensi diri. Laju tersebut menggambarkan upaya yang tengah dilakukan pemerintah.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Riva Setiara, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Sri Moedji Sampurnanto, Budi Sulistiyo. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Ferdian Jati Permana, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadi, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

- 5 DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 EKSPOSUR**
- 10 LINTAS PERISTIWA**
- 14 TOPIK PILIHAN**
- 15 TAGAR**

LAPORAN UTAMA

- 17** Fenomena *Tax Ratio* Indonesia
- 20** Infografis
- 22** Memperbaiki Jejak Rasio Pajak
- 25** Jaga Ekosistem *Marketplace*
- 27** Membidik Kenaikan Logis *Tax Ratio*

TRIVIA

- 29** Tahukah Kamu?

WAWANCARA

- 30** Harmoni Bersama Alam

FIGUR

- 34** Integritas Tanpa Batas

OPINI

- 37** Program *Secondment* Dalam Sinergi DJP-DJBC

OPINI

- 40** Beleid DP Nol Persen dan Harmoni Kebijakan

POTRET KANTOR

- 42** Menyambung Rasa Perkuat Kinerja

PROFESI

- 44** Tekun Merawat Amanat Rakyat

REGULASI

- 46** Insentif bagi Devisa Hasil Ekspor yang Ditempatkan di Bank Dalam Negeri

GENERASI EMAS

- 48** Selalu Ada Alasan untuk Terus Belajar

BUGAR

- 51** Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue

RENUNGAN

- 52** Yang Paling Bahagia

BUKU

- 53** Mengenal Obama Lewat Kata

LOKAL

- 54** *Hidden Paradise* di Pantai Lhoknga

FINANSIAL

- 56** Tips Menghadang Investasi Bodong ala *Millenials*



Dari Lapangan Banteng

Tax Ratio, Tak Kenal Maka Tak Sayang

Tax ratio adalah rasio/perbandingan antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, berbagai insentif dan pengecualian pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, dan kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak (*tax evasions and avoidances*). Rasio pajak juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya.

Pajak selain sebagai alat mengumpulkan penerimaan negara, juga merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi. Angka *tax ratio* dapat naik atau turun seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Dalam kondisi ekonomi lesu dan mengalami tekanan - seperti penurunan harga komoditas atau resesi ekonomi global, pemerintah suatu negara dapat memberikan stimulus ekonomi (*counter cyclical*) dengan menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif pengecualian pajak (*tax holiday, tax allowance*, atau pajak ditanggung pemerintah) - sehingga ekonomi dapat pulih dan bergairah kembali pertumbuhannya. Dalam situasi tersebut *tax ratio* justru dibuat menurun.

Demikian juga dalam kondisi ekonomi mengalami pemanasan (*overheating*) atau



cenderung menggelembung tidak sehat (*bubble*), maka pajak dapat ditingkatkan dan diefektifkan - untuk mengerem dan memperlambat perekonomian.

Jadi naik turunnya *tax ratio* adalah mencerminkan berbagai hal baik sebagai alat kebijakan fiskal maupun masalah struktural/fundamental suatu perekonomian dan negara. Di berbagai negara, *tax ratio* mengalami perubahan setiap periode, misalnya Amerika Serikat yang *tax ratio* pada tahun 2000 sebesar 28.2 (ekonomi relatif menguat sebelum krisis keuangan) dan tahun 2017 turun menjadi 27.1 (sebagai upaya stimulus mengembalikan pertumbuhan ekonominya). Pada tahun 2016, 26 negara mengalami kenaikan *tax ratio* bila dibanding tahun 2015, sementara itu 10 negara OECD lainnya mengalami penurunan.

Tax ratio juga mencerminkan kemampuan rezim pemerintahan dalam menyerap kembali PDB untuk diwujudkan

dalam penerimaan pajak yang pada akhirnya digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara mempunyai penghitungan yang berbeda terhadap *tax ratio* ini dengan memasukkan juga antara lain jaminan sosial dan pajak daerah. Sementara itu, komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Minyak dan Gas, dan PNBP dari sektor Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan Rasio Pajak di Indonesia.

Menyadari berbagai faktor yang menentukan *tax ratio* suatu negara, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi lima pilar utama yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan (UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengikutinya).

Selain itu, pemerintah akan senantiasa mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan kredibel dan profesional. Ini semua dilakukan dalam menjaga janji republik untuk mencapai masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi



Lapor SPT

Lebih Awal • Lebih Nyaman

Lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara *online*.
Gunakan e-filing dan lapor lebih awal
demi kenyamanan bersama.

djponline.pajak.go.id

#PajakKitaUntukKita



LATIH DISIPLIN CALON PEMIMPIN

Pelatihan Dasar (Latsar) merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi para CPNS Kemenkeu untuk diangkat menjadi PNS. Latsar dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap internalisasi, tahap aktualisasi, dan tahap evaluasi aktualisasi. Tujuan utama dari latsar adalah untuk membentuk PNS profesional yang disiplin dan berkarakter.

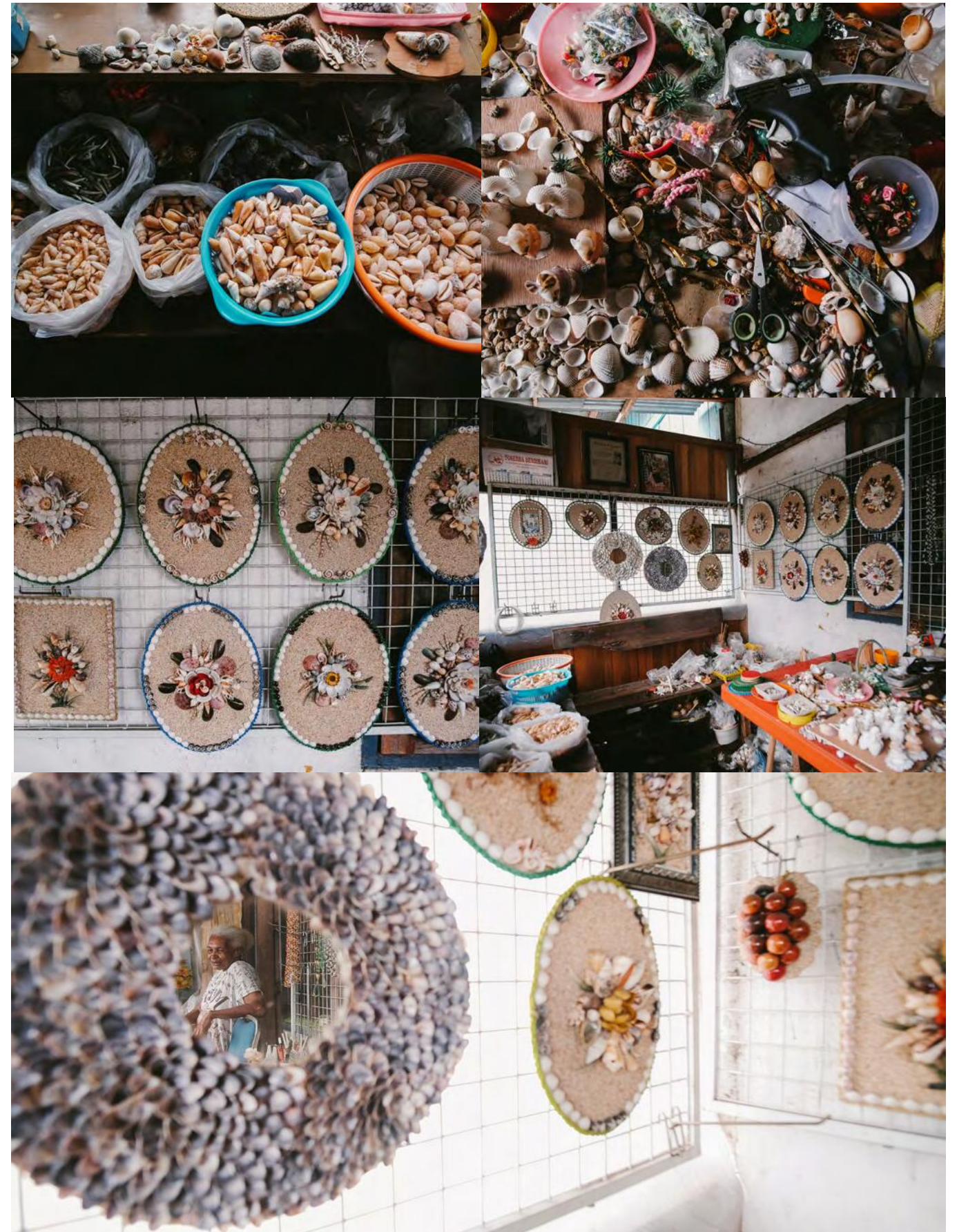
Foto
Resha Aditya
Pratama



Kulit Kerang Jadi Peluang

Mansinam art merupakan salah satu UMKM kerajinan lokal unggulan Kota Manokwari. Kerajinan ini mengubah kulit kerang menjadi hiasan yang indah dan unik. Saat ini mansinam art menjadi pusat oleh-oleh dengan harga yang sangat terjangkau bagi wisatawan. Hasil produk ini sudah di ekspor sampai ke Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Foto
Rezky R.





13/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Simplifikasi Ekspor Kendaraan CBU

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyederhanakan aturan ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (*Completely Built Up/CBU*) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi yang ditetapkan pada 11 Februari 2019. Dengan adanya relaksasi prosedur ekspor ini, pemerintah berharap ekspor kendaraan bermotor CBU akan meningkat sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi hambatan dalam ekspor. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara *Launching* Simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU) yang juga dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai di PT. Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta pada Rabu (13/02). Dalam aturan baru tersebut, pemerintah berupaya mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan tiga kemudahan. Pertama, ekspor kendaraan bermotor CBU dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kedua, pemasukan ke Kawasan Pabean tidak

memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Terakhir, pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat dilakukan tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal. "Kalau dulu semua sebelum masuk kawasan pabean, sekarang barang masuk kawasan pabean, dokumen PEB dapat diajukan dan tidak perlu NPE sebelum masuk kawasan pabean," pungkas Menkeu. Mekanisme ekspor baru ini membuat biaya logistik penyimpanan dan *handling* akan turun menjadi sebesar Rp600 ribu/unit dan biaya truk menjadi sebesar Rp150 ribu/unit. Total efisiensi biaya yang diperoleh lima eksportir terbesar kendaraan CBU mencapai Rp314,4 miliar/tahun. "Saya berharap DJBC akan terus meneliti seluruh aspek untuk mendorong ekspor dan melihat seluruh Undang-Undang dan *policy* yang kita miliki agar kita makin efisien dalam melayani pelaku usaha maupun peningkatan daya kompetisi dalam rangka mendorong ekspor lebih tinggi," ujar Menkeu. Sebagai informasi, tren ekspor dan impor kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan angka yang membaik dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, ekspor tercatat mencapai 63,56 persen atau meningkat sebesar 19,56 persen dari tahun sebelumnya dan impor sebesar 36,44 persen.

25/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Manfaat Pengelolaan Dana Desa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur pada Jum'at (25/01) mengatakan dalam kurun waktu empat tahun pertama (2015-2018), pelaksanaan Dana Desa telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam bidang infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun diantaranya berupa 191,6 ribu km jalan desa; 1.140,4 km jembatan desa; 9 ribu unit pasar desa; 4.175 unit embung desa; 24,8 ribu unit posyandu; 959,6 ribu unit sarana air bersih; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit drainase. "Jadi, kita sekarang sudah ada dana alokasi khusus yang sifatnya non-fisik. Jadi, kami ingin supaya daerah berlomba-lomba untuk mencapai prestasi dan kemudian kita memberikan insentif tambahan di luar DAU, DAK, DBH dan Dana Desa," jelas Menkeu.



31/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkeu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu dari Rekrutmen Umum Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Komplek Kemenkeu, Jakarta, Kamis (31/01). "Masuk di Kementerian Keuangan Anda memiliki lima nilai-nilai Kementerian yang harus dilaksanakan bukan diingat," pesan Menkeu. Lebih lanjut, Menkeu menjabarkan kelima nilai Kemenkeu serta menyampaikan contoh-contohnya sehingga lebih mudah dipahami oleh para pegawai baru peserta orientasi tersebut. Diharapkan arahan Menkeu tersebut betul-betul dapat dihayati dan diterapkan oleh para pegawai baru Kemenkeu pada saat menjalankan tugasnya.

01/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Trofeo Exhibition Kemenkeu, BPK dan PPATK

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan senam pagi bersama pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Stadion Bojana Tirta Rawamangun, kompleks Bea dan Cukai. Kegiatan ini juga melibatkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kegiatan ini dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola Trofeo Exhibition antara Kemenkeu, BPK dan PPATK. Dalam sambutannya, Menkeu memberikan apresiasi pada penyelenggaraan acara ini. "Ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kerjasama yang sangat baik antara tiga institusi yang sangat penting bagi keuangan negara di Indonesia. Jadi, saya berterima kasih pada pimpinan BPK dan PPATK dan seluruh jajarannya yang selalu bersedia untuk terus bekerja sama secara baik dengan kita baik di dalam kantor maupun di luar kantor," kata Menkeu.





01/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peluncuran Sukuk ST-003

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR) meluncurkan instrumen investasi Sukuk Tabungan seri 003 (ST-003) pada Jumat (01/02) di Jakarta yang dapat dimiliki mulai dari Rp1 juta. Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (*usury*), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. ST-003 dapat diperoleh dengan menghubungi 13 Mitra Distribusi berikut ini: Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI, BCA, BTN, Bank Permata, Trimegah, Bareksa, Investree, Modalku dan Tanamduit.

12/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Peresmian Kantor LPEI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mampu mengoptimalkan asetnya untuk mencapai tujuan yang diamanatkan, yaitu meningkatkan ekspor Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meresmikan kantor baru LPEI di Prosperity Tower SCBD, Selasa (12/02). "LPEI harus menjadi otak dalam berbicara strategi untuk membangun ekspor Indonesia," pesan Menkeu. Menkeu mengatakan LPEI dibangun dengan ambisi yang besar. Ia pun berharap seluruh jajaran pegawai LPEI juga memiliki ambisi yang besar. Oleh karena itu, Menkeu meminta agar LPEI membuat divisi penelitian, dan pengembangan (litbang) untuk mempelajari perkembangan ekspor di luar negeri. Hal ini perlu dilakukan karena LPEI juga harus mampu mengembangkan ekspor-ekspor baru dan memunculkan eksportir-eksportir baru.



12/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

APBN 2019 Untuk Penajaman Anggaran Pendidikan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan hal baru dan strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang salah satunya adalah mengenai penajaman anggaran pendidikan. "Kita ingin bagaimana membangun SDM yang berkualitas, punya tingkat produktivitas tinggi, punya daya saing yang tinggi dengan penguatan *value for money*," kata Wamenkeu dalam paparannya. Hal ini disampaikannya dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok pada Selasa, (12/02). Anggaran pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp492,5 Triliun. Anggaran ini dirinci melalui belanja pusat sebesar Rp163,1 triliun, belanja transfer daerah sebesar Rp308,4 triliun, dan melalui pembiayaan sebesar Rp21 triliun.



15/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Terima Penghargaan Pengelolaan Dokumen Kearsipan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima anugerah Akreditasi A (Sangat Baik) dalam pengelolaan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan diserahkan oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan di Yogyakarta pada Jumat, (15/02). Berdasarkan hasil penilaian dan pengujian yang dilakukan oleh tim akreditasi ANRI, Kemenkeu memperoleh akreditasi kearsipan dengan Kualifikasi A (Sangat Baik) dengan nilai 82,15. Saat menerima penghargaan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan sekaligus pengingat bagi Kementerian Keuangan untuk selalu menjaga kualitas pengelolaan arsip, serta meningkatkan kualitas layanannya bagi masyarakat. Terlebih, Kemenkeu merupakan institusi yang berada di atas tambang data. "Kementerian Keuangan agar tidak henti-hentinya melakukan inovasi dan kreativitas sehingga akses terhadap dokumen kearsipan kita akan semakin lebih mudah," pungkasnya.

13/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Sri Mulyani Menjawab

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fokus APBN 2019 pada acara MetroTV NewsRoom "Sri Mulyani Menjawab" yang tayang pada Rabu (13/02) di Jakarta. Menkeu mengatakan bahwa fokus APBN 2019 saat ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), selain infrastruktur yang terus digalakkan. "Fokus APBN 2019 adalah pembangunan SDM, namun bukan berarti kita meninggalkan pembangunan infrastruktur. Saat ini proyek infrastruktur yang terbilang besar sudah banyak yang selesai," terangya. Menurutnya, infrastruktur juga masih diprioritaskan karena konektivitas yang semakin dibutuhkan untuk menghubungkan Indonesia hingga ke daerah-daerah terpencil. Pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dapat diperoleh dari Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga mengurangi beban APBN.



Indonesia Darurat Utang?

Sorotan terkait dengan utang pemerintah memang menjadi isu yang berfluktuasi di masyarakat. Hal ini bermula dari imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada negara-negara berkembang untuk menjaga rasio utang di tengah dinamika perekonomian global yang semakin menantang pada akhir Januari. IMF mengatakan pengurangan utang pemerintah menjadi salah satu metode untuk menekan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Menkeu, imbauan IMF lebih ditujukan kepada negara yang memiliki rasio utang yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit fiskal yang belum memenuhi kategori aman, sehingga tidak relevan dengan kondisi Indonesia.

Beberapa waktu lalu, nilai total utang pemerintah Indonesia (per Desember 2018) yang naik Rp1.809,6 triliun dari posisi per akhir 2014 sebesar Rp2.608,7 triliun

TOPIK LAIN

Sorotan lain terkait Kemenkeu sebulan terakhir didominasi oleh kondisi ekonomi global yang melambat. Menurut Menkeu, perlambatan ekonomi global berdampak bagi negara berkembang seperti Indonesia karena investor berpotensi membawa dana yang dimilikinya ke negara *emerging market*. Di sisi lain, rilis BPS terkait pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 tercatat sebesar

menjadi Rp4.418,3 triliun mencuat menjadi isu hangat. Menanggapi polemik utang tersebut, Menkeu menuliskan sebuah puisi yang menjelaskan penggunaan utang yang diambil pemerintah. Di sisi lain, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan utang pemerintah saat ini masih terbilang sehat dan masih dalam rentang normal dibandingkan negara lain di dunia. Hal ini dibuktikan dengan rasio utang sebesar 29,98 persen dari total PDB.

Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Menkeu menegaskan bahwa utang pemerintah digunakan secara hati-hati melalui pembahasan bersama DPR. Menurutnya, utang tidak dilihat dari sisi nominalnya saja, tetapi juga dari keseimbangan primer (*primary balance*) yang menuju hampir nol. Mendukung Menkeu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa orang yang menyebut Menkeu sebagai menteri pencetak utang adalah orang yang tidak paham dengan

5,17 persen atau lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 5,07 persen, namun jauh di bawah target APBN yang dipatok 5,4 persen.

Sementara itu, sorotan neraca perdagangan kembali mencuat seiring hasil konferensi pers yang merujuk pada Direktur Eksekutif Statistik Bank Indonesia (BI). Dalam konferensi pers tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

ekonomi makro. Dunia tahu bahwa Sri Mulyani menjadi kebanggaan Indonesia dan dinobatkan sebagai Menkeu terbaik di Asia Pasifik, bahkan di dunia.

Dari kalangan ekonom, Bhima Yudhistira menyoroti dampak kenaikan utang pemerintah sebesar 10,5 persen pada 2018 yang belum memberikan efek signifikan dalam mendorong indikator produktivitas ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan dampak utang jangka pendek. Sementara itu, Vice President Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola utang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menyebut beban utang jatuh tempo yang mesti ditanggung pemerintah akan lebih besar karena banyaknya instrumen dan obligasi yang diterbitkan 3-5 tahun lalu yang jatuh tempo pada tahun ini.

tercatat pada kuartal IV-2018 mengalami surplus USD5,4 miliar naik dari posisi tahun sebelumnya USD1 miliar. Namun secara keseluruhan, dalam 2018 NPI masih defisit USD7,1 miliar.

Teks Abdul Aziz

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

- www.kemenkeu.go.id
- KemenkeuRI
- @KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- majalahmediakeuangan



@majalahmediakeuangan Tuliskan optimisme dan pandangan Anda terkait pengelolaan utang negara untuk generasi masa depan yang lebih baik.



Like

Reply



@titofebrian Peningkatan keterlibatan masyarakat Indonesia untuk pembangunan juga semakin tinggi dengan meningkatnya pembeli e-SBN di mana harapannya Indonesia tidak ketergantungan lagi dengan utang asing, melainkan dari gotong royong masyarakatnya sendiri.



@ceritayona "Hutan Sumatera rimbun rimbanya. Jika pakai jerat lekas punah si raja rimba. Hutang negara tuk membangun bangsa. Modal awal tuk masyarakat yang sejahtera."



@deemas28 Saya juga optimis pemerintah dalam mengelola utangnya selalu berhati-hati dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa



@KemenkeuRI Sampaikan optimisme kamu tentang target Pemerintah mencapai tax ratio yg ideal beberapa tahun ke depan



Like

Reply



@sulistiani1104 Peningkatan kepatuhan sukarela WP melalui sosialisasi betapa krusialnya pajak bg bangsa dan negara,, optimalkan influencer dan media sosial sasarannya generasi milenial



@ERDEFAS Kenaikan PDB, dan adanya aturan main dan regulasi yang jelas, serta basis data wajib pajak yang akurat, menjadikan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak meningkat.



@rizki6012 hal yg paling utama guna menaikkan tax ratio sendiri adalah sosialisasi akan pentingnya pajak.

FENOMENA *TAX RATIO* INDONESIA

Geliat aktivitas ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak telah menjadi tulang punggung negara. Kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Pada 2019, penerimaan perpajakan menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Artinya, segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, bergantung dari penerimaan perpajakannya.

Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menarik pajak dalam jumlah ideal. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Pada 2018, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5 persen. Artinya, porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia.

Mengenal *tax ratio*

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyampaikan, selain mencerminkan tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak, *tax ratio* juga menunjukkan kebijakan perpajakan yang dianut suatu negara, serta seberapa efisien dan efektif administrasi perpajakan negara tersebut.

Lebih lanjut Robert menjelaskan, “*Tax ratio* mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian.” Itu sebabnya, penghitungan *tax ratio* merupakan perbandingan nilai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada praktiknya, ukuran yang digunakan dalam menghitung *tax ratio* antara satu negara dengan negara lainnya tidaklah sama. Hal yang membedakan terletak pada definisi yang digunakan untuk menghitung jumlah penerimaan pajak. Robert Pakpahan menjelaskan,

Aktivitas ekonomi jadi komponen perhitungan *tax ratio*.

Foto
Habibullah Yusyaf



Sektor informal menopang sebagian besar struktur ekonomi Indonesia

Foto Resha Aditya

terdapat dua pendekatan dalam menghitung penerimaan pajak pada *tax ratio*, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Dalam arti sempit, *tax ratio* hanya memperhitungkan penerimaan pajak pusat, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh Direktorat Federal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jenis pajak ini meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, dan cukai. Sementara dalam arti luas, *tax ratio* juga memperhitungkan pungutan wajib yang dibayarkan warga negara kepada negara. Definisi ini memperhitungkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor sumber daya alam (SDA), pajak daerah, serta *social security contribution*.

Robert Pakpahan mengaku, dalam menghitung nilai *tax ratio*, Indonesia sudah mulai mengacu pada pengertian dalam arti luas. Dalam hal ini, Indonesia telah memasukkan unsur PNBP berupa royalti dari SDA berupa migas dan pertambangan umum. Meski demikian, pajak daerah dan kontribusi sosial belum masuk dalam perhitungan *tax ratio* Indonesia. Artinya, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi definisi *tax ratio* dalam arti luas. Beberapa negara yang telah memasukan semua unsur ini tentu saja memiliki tingkat *tax ratio* yang lebih tinggi.

Meningkat tapi masih rendah

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menuturkan, idealnya, tumbuhnya perekonomian suatu negara diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Artinya, pertumbuhan ekonomi (PDB) seharusnya berkolerasi positif dengan *tax ratio*. Sayangnya, konsep ini tidak berlaku di Indonesia.

“Fenomena rendahnya *tax ratio* di Indonesia merupakan suatu hal yang menyimpang dari konsep,” ungkap Yustinus. Dia menuturkan, perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh positif, tidak sejalan dengan kinerja pemungutan pajak yang cenderung stagnan.

Lebih jauh, Yustinus menyebutkan, terdapat empat sebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Pertama, secara faktual, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum maksimal. Yustinus menuturkan, hal ini dapat dilihat dari persentase kepatuhan wajib pajak yang masih berada pada angka 68 persen pada 2017.

“Meski demikian, persentase kepatuhan ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 63 persen pada 2016 dan sebesar 60 persen pada 2015,” katanya. Persentase ini, lanjut Yustinus, baru sebatas pada kepatuhan formal atau kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT). “Belum memperhitungkan kepatuhan material atau unsur kebenaran isi dari SPT,” jelasnya.

Dominasi sektor informal

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* Indonesia, menurut Yustinus adalah tingginya *hard to tax sector*, termasuk di dalamnya jumlah usaha yang masih bersifat rintisan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri, struktur perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor informal. Selama ini, sektor informal diketahui sulit untuk dipajaki.

Yustinus menjelaskan, pada satu sisi, UMKM menjadi penyumbang PDB

terbesar. “Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan mengah (KemenkopUKM), komposisi UMKM mencapai 59,2 juta unit atau 98,75 persen dari total 60,01 juta unit usaha yang ada di Indonesia,” kata Yustinus.

Namun, di sisi lain, besarnya porsi UMKM jadi tantangan pemerintah dalam memungut pajaknya. Diketahui, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar baru mencapai 1,69 juta. “Hal ini dikarenakan masih rendahnya kepatuhan dan literasi mengenai pajak pada sektor ini, serta tantangan yang dihadapi untuk mengajak para pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Yustinus mengapresiasi langkah pemerintah yang baru-baru ini menurunkan tarif pajak bagi UMKM menjadi 0,5 persen. “Hal ini untuk memperluas basis pajak dari sektor ini, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan insentif penurunan tarif,” akunya.

Ekonomi digital jadi tantangan

Berkembangnya aktivitas ekonomi digital juga jadi penyebab rendahnya *tax ratio*. Menurut Yustinus, hambatan berupa modernisasi perangkat teknologi informasi yang canggih, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, serta regulasi yang akseleratif dengan perkembangan dunia digital menjadi tantangan bagi pemerintah. “Akibatnya, pemerintah kesulitan meng-*capture* potensi pajak karena keterbatasan regulasi dan instrumen administrasi,” terangnya.

Menyikapi hal ini, pemerintah telah menelurkan kebijakan terbaru terkait pajak *e-commerce*. Ini menjadi cara pemerintah untuk memastikan jalannya prinsip keadilan dalam pengenaan pajak. Artinya, setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak, betul-betul menjalankan kewajibannya. Meski demikian, PMK tersebut tidak mengatur jenis pajak baru, melainkan upaya pemerintah untuk memberlakukan kesetaraan pajak bagi warga negaranya.

Sebagaimana diketahui, potensi pajak dari sektor *e-commerce* begitu besar. Hootsuite, lembaga riset media sosial di Singapura, dalam laporan *Digital In 2017 Global Overview*, menyebutkan pada Januari 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai 51 persen dari total penduduk. Adapun 9 persen atau 24,7 juta penduduk membeli barang/jasa secara *online*. Diketahui nilai transaksi pada 2016 sebesar USD5,6 miliar.

Penghindaran pajak

Yustinus melanjutkan, hal lain yang menjadi sebab

rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan. “Hal ini tercermin melalui data yang berasal dari program *tax amnesty* serta data Panama Papers, Paradise Papers, Swissleaks, dan sebagainya. Ini menunjukkan upaya menghindari pengenaan pajak oleh beberapa pihak di Indonesia,” sebutnya. Menurut Yustinus, selain berpengaruh langsung bagi penerimaan pajak, praktik penghindaran pajak juga berdampak pada tidak maksimalnya kinerja pemungutan pajak.

Dalam mengatasi upaya penghindaran pajak ini, program *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah pada 2016-2017 dinilai cukup berhasil. Kepatuhan wajib pajak diketahui mengalami peningkatan 70,98 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 61 persen. Penerimaan negara meningkat melalui jumlah uang tebusan yang diterima pada program tersebut mencapai Rp114,5 triliun. “Apabila dikonversi ke dalam bentuk rasio maka jumlah tersebut dapat berkontribusi sebesar 0,84 persen terhadap PDB,” ungkap Robert Pakpahan. Diketahui pada 2018, *tax ratio* Indonesai meningkat dari 10,7 persen menjadi 11,5 persen pada 2018.

Dongkrak Rasio

Pemerintah terus berupaya meningkatkan *tax ratio* Indonesia. Meski demikian, kenaikan *tax ratio* perlu dilakukan secara bertahap dan tidak drastis, agar tidak memberatkan perekonomian. “*Less than* 1 persen lah tumbuhnya dalam setahun. Kalau tiba-tiba naik besar gitu, ya ekonomi kaget juga,” ungkap Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan.

Pemerintah memproyeksikan

tingkat *tax ratio* paling realistis maksimal berada di angka 13,6 persen pada 2022. Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah adalah melalui Reformasi Perpajakan. Beberapa hal yang diperbaiki meliputi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, data, teknologi informasi, hingga regulasi. Diakui Robert Pakpahan, saat ini DJP tengah membangun sistem informasi yang canggih guna mengintegrasikan seluruh bisnis proses agar terotomasi dalam satu platform besar.

“Harusnya itu menambah kemampuan kami untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan,” ungkapnya. Dia menambahkan, pengembangan terus dilakukan DJP, mulai dari proses pelayanan, edukasi, pengawasan, pemeriksaan hingga penegakan hukum. “*Every proses* bisnis itu *need to be improved*,” katanya.

Sementara itu, Yustinus menilai upaya pemerintah dari sisi regulasi dalam menggenjot *tax ratio* selama ini dinilai cukup positif. “Beragam bentuk perbaikan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih adil, pasti, cepat dan mudah. Mulai dari *reinventing policy*, kenaikan PTKP, *tax amnesty*, konfirmasi status WP, UU AEOI, Pembaruan Sistem Informasi, pemeriksaan pajak, percepatan restitusi, penurunan tarif WP UMKM, dan CRS AEOI. (Semuanya) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* dan basis pajak, serta pada saat yang sama meningkatkan kepatuhan WP,” ungkapnya.

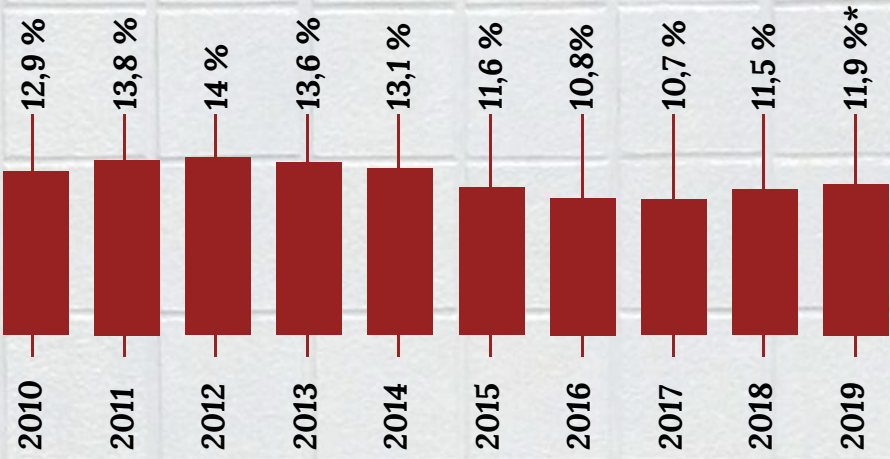
Teks Farida Rosadi

MENINGKATKAN RASIO PAJAK

Pemerintah Indonesia terus berupaya keras agar rasio pajak dapat mencapai angka yang ideal. Upaya ini dilakukan agar dapat mendorong kinerja perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. Dibandingkan negara-negara lain, *tax ratio* di Indonesia masih harus terus ditingkatkan agar dapat mengejar ketertinggalan.

CAPAIAN TAX RATIO INDONESIA

Sumber:
Direktorat Jenderal Pajak



FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VARIASI BESARAN *TAX RATIO*:

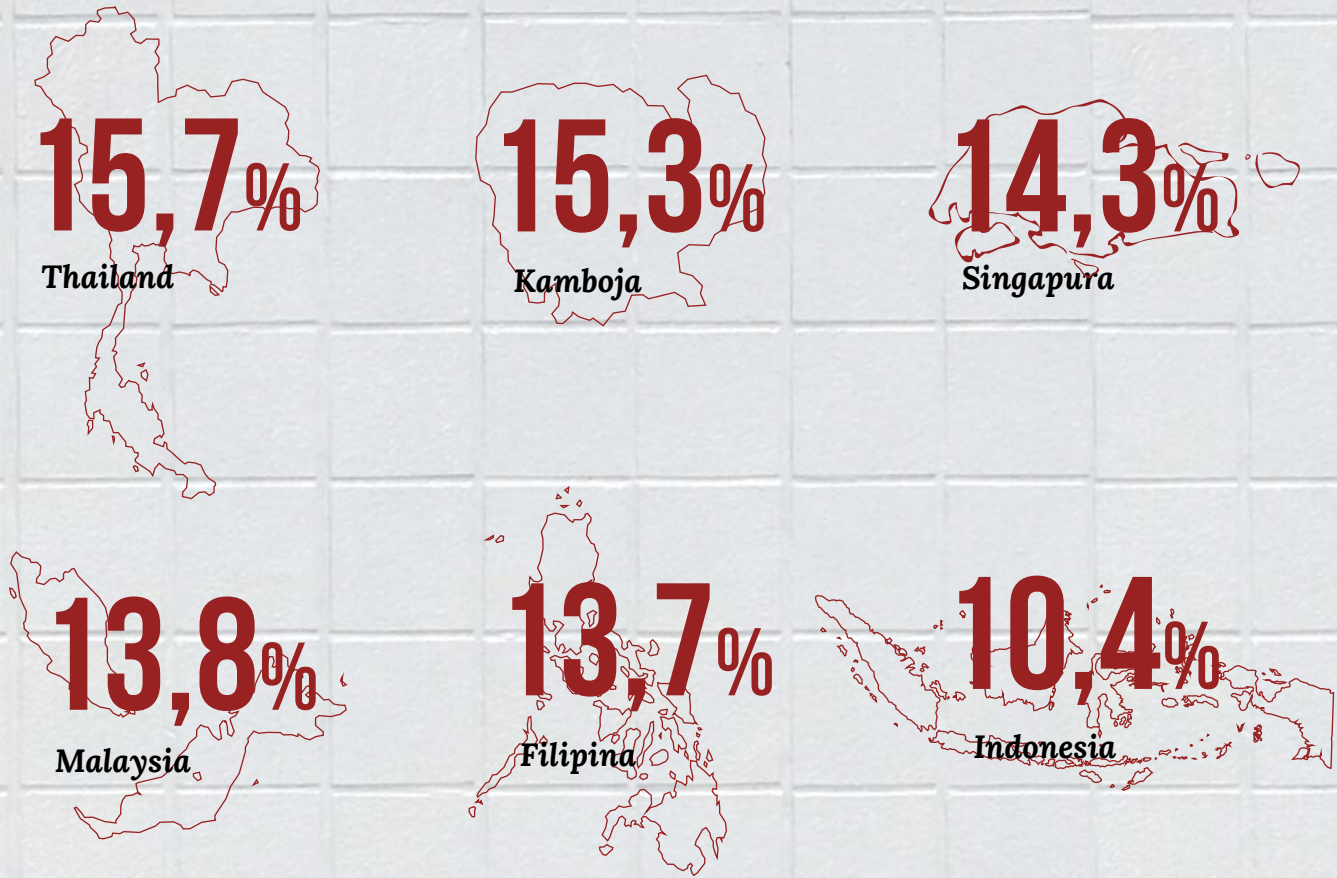
- Perbedaan definisi dan komponen penerimaan pajak
- Besarnya penerimaan pajak
- Struktur Ekonomi yang berpengaruh pada kebijakan perpajakan

UPAYA PENINGKATAN *TAX RATIO*

- Mendorong Optimalisasi Penerimaan
- Mengeluarkan Kebijakan Pajak Untuk Daya Saing
- Memberikan Insentif Perpajakan Yang Tepat Sasaran
- Menggalakan Peningkatan Kepatuhan dan Pengawasan

Sumber: BKF (Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017)

TAX RATIO DENGAN NEGARA-NEGARA DENGAN *ECONOMY SIZE* SERUPA TAHUN 2018



Sumber: Data OECD

"*TAX RATIO* MASIH DI BAWAH 15%. KITA MASIH BERKUTAT SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR 10% - 12%. BERARTI MASIH BANYAK POTENSI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK,"
- SRI MULYANI INDRAWATI

Sumber: Menkeu pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 9 Nov 2018.

MEMPERBAIKI JEJAK RASIO PAJAK



Optimalisasi kapasitas fiskal mempengaruhi pemerataan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan

Foto
Anas Nur Huda

Meski langit tampak mendung, suasana di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak lekas lengang. Aktivitas yang padat rutin tetap berjalan seperti biasa. Sama halnya dengan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak yang dilantik pada 30 November 2017 tersebut berkenan meluangkan waktu untuk diwawancara oleh Media Keuangan di sela-sela kesibukannya. Sembari ditemani secangkir teh, ia pun bercerita terkait pentingnya rasio pajak dalam perekonomian nasional.

Robert mengungkapkan *tax ratio* merupakan indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total nilai perekonomian yang ada, dalam hal ini adalah total Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih jauh, ukuran *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara.

“Jadi rasio pajak sangat penting dan *tax ratio* sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa dipengaruhi oleh struktur ekonominya, dipengaruhi oleh tingkat

kepatuhan perpajakan, dipengaruhi oleh aturan-aturannya, ketentuan-ketentuan perpajakannya, mana yang jadi objek pajak dan mana yang tidak, serta juga dipengaruhi oleh administrasi perpajakannya sendiri. Seberapa mampu dia melayani dan mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jadi *overall* sangat penting. Kalau *tax ratio* besar berarti uang yang didapat negara lebih besar sehingga harusnya negara lebih bisa berbuat banyak,” ungkap Robert.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menjelaskan lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3 persen. Pertumbuhan perpajakan ini menurut Menkeu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Rasio pajak pun mencapai 11,5 persen dari PDB atau meningkat sebesar 0,8 persen dari tahun 2017. Menurutnya, kesadaran membayar pajak, peningkatan basis data pajak pascaamnesti pajak, serta informasi yang didapat dari *Automatic Exchange of Information* (AEOI) akan dapat terus meningkatkan penerimaan perpajakan.

“Dengan perbaikan penerimaan perpajakan maka rasio pajak mengalami perbaikan yang cukup signifikan hanya dalam waktu 1 tahun,” ungkap Menkeu saat Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2018 pada awal tahun.

Daya ungkit reformasi

Menurut Staf Ahli Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, salah satu upaya untuk mengungkit rasio pajak adalah melalui reformasi perpajakan. Program reformasi tersebut menjadi titik sentral dan determinan utama bagi peningkatan kinerja perpajakan karena melalui program tersebut pemerintah melakukan perbaikan institusi perpajakan secara menyeluruh, terutama dari sisi regulasi, administrasi, dan kelembagaan aparatur perpajakan.

Dalam konteks yang lebih luas, program reformasi perpajakan diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan yang terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal, yaitu memberikan stimulus ekonomi makro, mendorong produktivitas sektor riil, meningkatkan kapasitas fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks tersebut, salah satu

indikator yang akan dicapai adalah peningkatan rasio pajak secara signifikan dan berkelanjutan.

Suryo Utomo juga menyebutkan jika ingin *tax ratio* naik, ujungnya yang diperlukan adalah *reform*. Secara prinsip ada dua *reform*, *administrative reform* dan *policy reform*. “Ini yang selalu kita gerakkan,” terangnya.

Lebih jauh ia menjelaskan *policy reform* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersifat menyeluruh dan memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi. “*Fiscal policy* bukan hanya dimaknai sekedar dari sisi penerimaan saja, namun termasuk sisi pengeluaran. Jadi, istilah kata penerimaan sendiri dengan kondisi ekonomi yang ada adalah bagaimana kita meng-*collect* dari ekonomi. Nah meng-*collect* lebihnya mungkin dilakukan dengan cara *administrative reform*, namun kalau kita mau *boosting* ekonomi, kita bicara *policy reform*, termasuk di antaranya bagaimana pengeluaran negara ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya saat melakukan audiensi dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir, mengungkapkan yang lebih penting adalah bagaimana penerimaan negara baik dari pajak maupun nonpajak dapat digunakan sebaik mungkin untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi pembangunan sesuai dengan konsep *value for money*. Selanjutnya adalah upaya menaikkan *tax ratio* merupakan

keniscayaan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang masih relatif rendah, sehingga reformasi perpajakan merupakan agenda penting dalam reformasi fiskal. “Namun harus dilakukan secara terukur dan bertahap. Karena jika dilakukan secara terburu-buru dapat mengakibatkan *overburden* dalam perekonomian yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Amir menambahkan bahwa data dari World Bank, IMF, dan OECD menunjukkan bahwa *tax ratio* negara maju seperti Inggris sebesar 30,6 persen, Jerman 37,0 persen, dan negara Skandinavia memiliki *tax ratio* di atas 40 persen. Untuk beberapa negara di wilayah Asia Tenggara *tax ratio*-nya berkisar 15 persen, seperti Thailand 16,5 persen, Malaysia 14,4 persen, Filipina 13,67 persen, Singapura 14,29 persen, dan Kamboja 15,3 persen. Lebih lanjut, data World Bank tahun 2016 menyebutkan rata-rata *tax ratio* dunia sebesar 15,06 persen. Jika dilihat dengan angka-angka ini tentu angka *tax ratio* Indonesia tergolong rendah.

“Namun perlu dicatat, bahwa Indonesia sejak 2018 telah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan yang menyatakan bahwa *tax revenue forgone* 2017 sekitar 1,14 persen dari PDB. Jika ini diperhitungkan maka *tax ratio* Indonesia sudah mendekati angka 12,6 persen. Perlu kembali diingat bahwa setiap negara memiliki karakter sistem perpajakan yang berbeda,” ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut,

ekonom INDEF, Bhima Yudistira, mengatakan dibandingkan negara berkembang khususnya di wilayah Asia tenggara kondisi *tax ratio* Indonesia memang terbilang rendah. Pelajaran penting dari negara yang memiliki rasio pajak tinggi adalah konsistensi reformasi perpajakan, khususnya berkaitan dengan perluasan basis pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan dan mendorong jumlah fiskus agar proporsional dengan perkembangan jumlah wajib pajak baru.

Amnesti pajak

Terkait amnesti pajak dalam reformasi perpajakan, Staf Ahli Kepatuhan Perpajakan, Suryo mengungkapkan dari sudut pandang perbaikan basis data, kebijakan amnesti pajak memberikan tambahan basis pajak baik orang pribadi maupun badan, serta adanya tindak lanjut kebijakan berupa *monitoring*, pengawasan dan penegakan hukum. Lebih lanjut, kebijakan tersebut diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh nonmigas dalam APBN 2019.

Dari sudut pandang penerimaan pajak, program *tax amnesty* berhasil menghimpun penerimaan pajak dengan total penerimaan yang cukup signifikan. Total penerimaan dari amnesti pajak berjumlah Rp134,9 triliun yang terdiri dari penerimaan uang tebusan dan penghentian bukti permulaan sebesar Rp115,96 triliun, serta pelunasan tunggakan pajak Rp18,96 triliun. Di sisi lain, kebijakan amnesti pajak juga secara simultan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta membentuk budaya taat pajak yang lebih baik.

Kebijakan lanjutan dari amnesti pajak, *Automatic Exchange of Information* (AEOI), atau yang sering disebut program pertukaran informasi data perpajakan, juga memiliki dampak reformasi. Dengan AEOI, pemerintah memiliki langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. AEOI juga menjadi sebuah instrumen kebijakan untuk mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara atau penghindaran pajak. Dalam konteks pemetaan Wajib Pajak, AEOI dapat berfungsi sebagai alat dalam pemetaan profil risiko Wajib Pajak, serta sebagai indikator dan sarana untuk mewujudkan kepatuhan material Wajib Pajak.

“Implementasi kedua program tersebut secara simultan diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan membayar pajak secara sukarela. Tak hanya itu, kebijakan tersebut menjawab tantangan peningkatan dan optimalisasi kapasitas fiskal dalam konteks pembiayaan program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Perbaikan ke depan

Ke depannya, Suryo menjelaskan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjaga rasio pajak yang realistis. Kebijakan umum perpajakan yang akan ditempuh adalah optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang mutakhir dan terintegrasi. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable voluntary compliance*).

Ketiga, memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendorong daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, serta melanjutkan reformasi perpajakan secara simultan dan komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan transparansi informasi di bidang perpajakan dengan optimalisasi perjanjian perpajakan internasional

dan AEOI. Terakhir, perlu dilakukan perumusan kebijakan perpajakan terkait perumusan tarif untuk mendorong redistribusi pendapatan dalam konteks penurunan kesenjangan ekonomi.

“Yang jelas kalau untuk menumbuhkan *tax ratio* adalah dengan menambah basis perpajakan. Kita sudah menambahkan basis pemajakan kan, lalu setelah menambah basis otomatis kita harus mengawasi atau memastikan basis itu memang bergerak ke arah yang benar. Mulai dari menambah basis kita punya ekstensifikasi, kemudian yang sudah masuk ke sistem, kita memastikan benar tidak mereka sesuai untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kalau diawasi masih belum, ya kita lakukan *law enforcement*, itu sudah hukum wajib yang ada di UU KUP. Nah yang menjadi krusial bagaimana kita melakukan itu secara efisien dan efektif,” pungkasnya.

Senada dengan Suryo, ekonom INDEF, Bhima juga mengajukan solusi untuk mendorong *tax ratio* di Indonesia. Pertama adalah dengan memanfaatkan data *tax amnesty* dan AEOI untuk mengejar potensi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak kakap yang menempatkan hartanya di luar negeri. Kedua, memperluas basis pajak baru, khususnya di bisnis digital atau perusahaan *over the top*. Yang ketiga adalah memperkuat kelembagaan perpajakan dengan mengadopsi sistem IRS (*internal revenue service*) dari Amerika. Terakhir adalah merumuskan pola komunikasi perpajakan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha.

Teks Abdul Aziz



Laporan Utama

JAGA EKOSISTEM MARKETPLACE

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia kian tak terbendung. Berdasarkan hasil riset Google dan Temasek yang tertuang dalam laporan e-Conomy SEA 2018, Indonesia memimpin pasar sektor *e-commerce* di kawasan Asia Tenggara dengan capaian nilai bisnis sebesar USD12,2 miliar pada tahun 2018. Diperkirakan, pada tahun 2025 angka tersebut akan terus melambung hingga USD53 miliar.

Untuk mendorong percepatan sektor *e-commerce* di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Mayoritas pelaku usaha di *market place* merupakan UMKM

Foto Resha Aditya Pratama.

"Kami tidak ingin mencederai suatu sektor atau industri. Kalau sektor ini tidak berkembang, yang rugi kami sendiri karena tidak mendapat penerimaan pajak. Itu suatu prinsip dasar yang perlu dipahami."

Hestu Yoga S.
Direktur
Penyuluhan,
Pelayanan,
dan Hubungan
Masyarakat
Direktorat
Jenderal Pajak

Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan *Road Map e-Commerce* mengamanatkan berbagai dukungan program bagi perkembangan sektor *e-commerce*, salah satunya di bidang perpajakan. "Nah, PMK 210 adalah turunan dari Perpres itu," tuturnya. Ia merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang disahkan 31 Desember 2018 lalu.

Dua minggu usai terbitnya PMK 210, sempat muncul kekhawatiran dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) yang menganggap aturan tersebut akan menghambat tumbuhnya sektor *e-commerce* di Indonesia. Hestu menggarisbawahi PMK 210 tidak akan pernah menjadi *disruption* terhadap sektor *e-commerce*.

"Kami tidak ingin mencederai suatu sektor atau industri. Kalau sektor ini tidak berkembang, yang rugi kami sendiri karena tidak mendapat penerimaan pajak. Itu suatu prinsip dasar yang perlu dipahami," tegas Hestu. Namun, ia menambahkan PMK 210 tidak ditargetkan untuk meraih angka penerimaan pajak tertentu. Tujuan utamanya yakni peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak. Jika tujuan tersebut tercapai, dengan sendirinya akan menyumbang penerimaan pajak dan mendorong *tax ratio*. PMK ini juga tidak mengatur jenis atau tarif pajak baru, tetapi diharapkan menjadi solusi upaya menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan

pihaknya juga berusaha memahami bagaimana ekosistem *marketplace*. Masih banyak pemain pemula yang baru bergabung dan memiliki omzet kecil, misalnya para remaja yang sedang belajar berdagang. Robert menyatakan DJP tidak ingin membuat aturan yang menciptakan kekhawatiran dan ketakutan bagi mereka. Oleh karena itu, dalam ketentuan teknis yang sedang disusun, direncanakan akan ada kemudahan bagi pedagang/penyedia jasa di *marketplace* yang memiliki omzet penjualan di bawah Rp300 juta selama setahun. "Nanti kami akan buat aturannya, kalau penjualannya masih di bawah Rp300 juta ya tidak apa-apa tidak usah bayar pajak, tidak usah lapor pajak, tidak usah dimintai Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan. Bagi mereka, kemudahan itu sudah cukup *comfortable* dan cukup menjaga ekosistemnya."

DJP terus berkoordinasi dengan idEA dalam menggodok ketentuan teknis turunan PMK 210 guna mencari solusi terbaik. Diharapkan, aturan pajak *e-commerce* kemudian dapat diimplementasikan tanpa hambatan berarti. Jika ketentuan teknis sudah selesai dibuat, DJP akan melakukan sosialisasi dalam dua *layer*. Pertama, kepada sekitar 300 *marketplace* di Indonesia. Kedua, kepada para pedagang/penyedia jasa atau pelapak yang 70 persen-90 persen diantaranya diperkirakan merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Chief Executive Officer*

(CEO) BLANJA.com Jemy Confido menyambut baik terbitnya PMK 210. Namun, ia sedikit mencemaskan waktu persiapan penerapan PMK 210 akan terlalu singkat, mengingat ketentuan teknis berupa Peraturan

Direktur Jenderal Pajak hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya, DJP akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan sosialisasi teknis. Di sisi lain, pihaknya juga perlu mempelajari aturan lebih detail dan mempersiapkan segala hal terkait. "Kami harus mengeluarkan upaya keras untuk mengedukasi penjual, sedangkan waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk proses edukasi ke penjual dan pelaku industri terlalu singkat. Setidaknya, kami butuh waktu satu tahun untuk sosialisasi aturan itu," kata Jemy.

Kurangnya sosialisasi aturan pajak *e-commerce* kepada para pedagang/penyedia jasa dikhawatirkan Jemy akan mendorong mereka untuk beralih ke media sosial. Menanggapi kekhawatiran ini, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofyanto Kurniawan menilai tidak mudah bagi konsumen untuk begitu saja beralih ke media sosial sebab tidak ada penjamin yang melindungi kepentingan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sebagaimana diperankan *marketplace*. Sementara itu, Hestu menegaskan bahwa pelaku usaha di media sosial juga sama-sama memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PMK 210. Ia mengakui pengawasan di media sosial memiliki karakter berbeda, tetapi saat ini DJP sedang mengembangkan model pengawasan dengan mempelajari sistem di Australia.

Teks Reni Saptati D.I.

MEMBIDIK KENAIKAN LOGIS *TAX RATIO*

Robert
Pakpahan,
Direktur
Jenderal Pajak

Foto
Resha Aditya
Pratama

su *tax ratio* sempat menjadi perbincangan hangat. Angka *tax ratio* Indonesia terbilang cukup rendah dan belum dalam kondisi ideal. Seberapa besar target paling logis yang bisa dicapai Indonesia dan bagaimana cara pemerintah meraih target *tax ratio* tersebut? Simak wawancara Media Keuangan bersama Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengenai *tax ratio* berikut.

Bagaimana peran *tax ratio* dalam perekonomian?

Tax ratio mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian, yaitu total produk domestik bruto. Ukuran *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Untuk ukuran internasional, *tax ratio* 15 persen kebawah itu tergolong masih rendah, dan kita tergolong negara yang *tax ratio*-nya masih rendah dibanding banyak negara.

Besar *tax ratio* itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, struktur ekonominya, tingkat kepatuhan perpajakan, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perpajakannya. Selain itu *tax ratio* juga dipengaruhi oleh administrasi perpajakan, seberapa mampu pemerintah melayani dan mengawasi tingkat kepatuhan. Dengan *tax ratio* yang besar, berarti uang yang didapat negara lebih besar, sehingga negara bisa lebih banyak berbuat.

Pengertian *tax ratio* dapat dipahami dalam arti sempit dan luas. Apa definisi yang digunakan Indonesia dalam mengukur *tax ratio*?

Kita sekarang menuju ke definisi secara luas. Definisi arti sempit *kan* murni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, dan cukai. Namun, di dalam arti yang lebih komprehensif, yang juga direkomendasikan OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), adalah *tax ratio* dalam

Tahukah kamu?



Pada masa pendudukan Hindia Belanda, nama resmi Bea Cukai adalah **De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen** (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Sedangkan petugas Bea Cukai disebut dengan douane.

full twenty four bisnis proses yang *core* itu terotomasi di dalam suatu *platform* besar, *integrated*. Harusnya itu menambah kemampuan kami untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan. Mudah-mudahan itu bisa *me-maintain* agar *tax ratio* tumbuh lagi 0,7 persen di *later on* di 2020–2021.

Apa upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan *tax ratio*?

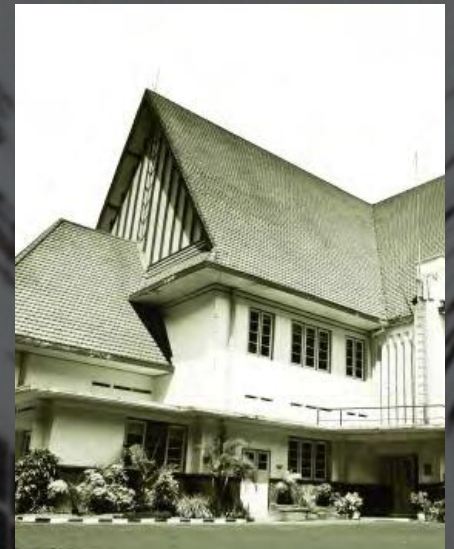
Di DJP itu kan proses bisnisnya banyak sekali, itu perlu di-*deliver* dengan lebih bagus di tiap prosesnya. Proses bisnis paling awal sebenarnya pelayanan dan edukasi. Melayani supaya orang itu masuk sistem, meng-*educate* supaya dia tahu apa yang terhutang pajak. Itu penting. Sudah banyak kemajuan, tetapi akan terus di-*improve*, dipastikan semua lapisan masyarakat itu pernah mendengar dan mengetahui.

Setelah itu, baru pengawasan. Memonitor siapa yang patuh dan tidak patuh. Itu metodenya juga perlu di-*improve* dari waktu ke waktu, tidak bisa mengandalkan manual. Wajib pajak kita sekarang sudah 40 jutaan. Harus ada metode yang otomasi. (Maka), kami membangun CRM (*Compliance Risk Management*), supaya ada forum manajemen tata kelola. Menguji secara otomasi, supaya jangan *effort* kita terarah ke yang kecil-kecil. Setelah CRM lebih bagus, baru pemeriksaan dan penegakan hukum. Bagaimana yang *fair*, cepat, *free of corruption*, tidak *over*, dan *under taxing*. Itu juga perlu dibangun kualitasnya. (Jadi) setiap proses bisnis itu *need to be improved*.

Teks Farida Rosadi



Seiring perkembangan zaman, Kementerian Keuangan masih mempertahankan pemanfaatan **bangunan cagar budaya** untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain Gedung BPIB Bea Cukai Medan dan Gedung KPPN Malang.



Gedung KPPN Malang dibangun pada tahun 1927. Gedung ini mulanya diperuntukkan sebagai gedung Sekolah Rakyat Cina (Hollandsch Chinesche School/HSC).

tercapai angka 13,6–13,7 persen di 2022.

Yang perlu dikelola adalah *me-maintain* kenaikan 0,6 *percentage point* itu. Reformasi administrasi perpajakannya harus *continue*, kemudian *willingness* dari wajib pajak, kepatuhan masyarakat juga harus ada. Kemudian struktur ekonominya mudah-mudahan tumbuh terus, dan aturannya pun kita perbaiki, sehingga kepatuhan itu secara otomatis makin tinggi.

Bagaimana pengaruh *tax reform* dan *tax amnesty* dalam menggenjot kenaikan *tax ratio* ini?

Melihat *reform* yang ada akhir-akhir ini harusnya cukup optimis. Undang-Undang *Tax Amnesty* yang kemarin sudah diluncurkan menghasilkan kepatuhan baru, aset yang di-*declare* baru, sehingga yang masuk ke *network* pajak makin banyak. Itu modal untuk menambahkan *tax ratio* ke depan.

Ketersediaan data ataupun akses data kepada DJP juga meningkat, baik data keuangan dari domestik maupun dari luar negeri. *Automatic exchange of information* (AEOI) itu juga perlu, untuk bisa *me-maintain* kenaikan *tax ratio* sebesar 0,6–0,7 *percentage point* dalam satu tahun. Tiap tahun perlu kita jaga itu.

Kami juga sedang membangun sistem informasi yang canggih, otomasi di pajak dengan membeli *core tax*, supaya sistem kerja kami, semua proses bisnisnya terotomasi. Saat ini yang terotomasi baru beberapa, seperti pembayaran, pendaftaran, pelaporan. Hanya itu yang masuk di sistem utama. Untuk yang lain terpaksa dibangun aplikasi-aplikasi tempelan, tidak menjamin ada *integrated*.

Kalau yang sedang kita beli nih

arti luas. Definisi ini memasukkan juga royalti sumber daya alam (SDA). Penerimaan royalti di Indonesia masuk ke PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saat ini, kita memasukkan royalti dari migas dan royalti PNPB dari pertambangan umum sebagai komponen *tax ratio*.

Apakah *tax ratio* ideal Indonesia berada pada angka 16 persen?

Idealnya mengarah ke sana, tumbuh, tetapi *nggak* boleh tumbuh secara drastis. Sebab, *tax ratio* mengukur seberapa besar pajak diambil dari ekonomi. Kalau pajak diambil dari ekonomi, berarti itu mengambil sumber daya atau uang dari swasta. *Tax ratio* Indonesia pada 2018 adalah 11,5 persen. Artinya dari ekonomi itu kita mengambil 11,5 persen. Sisanya 88,5 persen itu diserahkan ke swasta untuk dibelanjakan. Kalau *tax ratio* kita 16 persen, hanya 84 persen yang kita serahkan ke swasta. Jadi bagi ekonomi sebenarnya mana yang lebih bagus dalam membelanjakannya.

Menurut kami, idealnya *tax ratio* naik perlahan-lahan mengarah ke 15 persen. Namun, harus secara gradual. Sebab, kalau tiba-tiba mengambil besar, ekonominya kaget juga. Jadi tadinya biasa dibelanjakan swasta, tiba-tiba dibelanjakan pemerintah. *Kan* belum tentu bagus juga terhadap ekonomi.

Selanjutnya, untuk menaikkan *tax ratio* perlu perangkat yang banyak. Sebab *tax ratio* itu tidak semata-mata bergantung dari Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, atau Dirjen Bea Cukai. Jadi kalau bisa gradual, tidak drastis, dan dikerjakan bersama-sama oleh semua unsur yang ada di negara.

Administrasi perpajakannya, *education*-nya, kepatuhannya (semua) di-*improve*. Instansi lain juga ikut *improve* karena pajak itu *nggak* bisa naik tanpa dukungan dari instansi lain. Di sini (perlu) *effort* yang komprehensif kalau mau sukses. Kemudian, penggunaannya harus efisien, APBN-nya harus sehat, khususnya sisi pengeluaran.

Berdasarkan *Medium Term Fiscal Framework* (MTFF), target *tax ratio* pada 2022 adalah sebesar 13,6 persen. Apakah hal tersebut cukup realistis diwujudkan??

Itu realistis di 2022. Kita sudah melihat dua tahun terakhir, kita bisa naik 0,8 *percentage point*. Dari 10,8 persen tumbuh ke 11,5 persen di 2018. Jadi (kenaikan) 0,8 cukup *strong*. Pada 2019 kita ekspektasinya 12,1 persen, dari 11,5 persen naik 0,6 persen. Saya hitung–hitung itu kalau 2020 naik 0,6–0,8 *percentage point*, maka akan



Wawancara

Seorang petugas BMKG sedang memonitor cuaca

Foto Anas Nur Huda

Harmoni Bersama Alam

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, diapit dua samudera, serta dilalui garis khatulistiwa menyebabkan cuaca dan iklimnya sangat dinamis. Bencana akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi pun cukup sering terjadi di Indonesia. Ditemui di kantornya, Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) A. Fachri Radjab mengajak Media Keuangan untuk lebih bisa beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia.

Bagaimana cara BMKG dalam memprakirakan cuaca dan iklim di Indonesia?

Perbedaan antara prakiraan cuaca dan iklim terletak pada rentang waktunya. Rentang hingga tujuh hari ke depan disebut prakiraan cuaca, sedangkan di atas tujuh hari disebut prakiraan iklim. Perlu diketahui, cuaca dan iklim di Indonesia sangat unik. Mengapa? Selain karena berada di garis ekuator, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Interaksi antara laut dan darat sangat kuat. Berbeda dengan negara Australia yang berada dalam satu pulau sehingga cuaca dan iklimnya lebih mudah diprediksi. Indonesia sudah berpulau-pulau, banyak gunung, banyak laut pula. Nah, sangat dinamis.

BMKG membagi Indonesia menjadi 342 zona musim berdasarkan perbedaan antara musim kemarau dan musim hujannya. Di luar itu terdapat non-zona, yaitu daerah yang tidak jelas perbedaan antara musim kemarau dan musim hujannya, seperti Bogor dan Toraja. Keduanya memiliki curah hujan sangat tinggi. Ada juga daerah yang memiliki curah hujan rendah, misalnya Jember dan Banyuwangi.

Seberapa besar pengaruh tingkat curah hujan terhadap kejadian bencana alam di suatu daerah?

Secara garis besar terdapat dua jenis bencana, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam sendiri dibedakan menjadi bencana geologi dan hidrometeorologi. Gempa dan tsunami termasuk bencana geologi, sedangkan kejadian banjir, longsor, kekeringan, dan puting beliung merupakan bencana hidrometeorologi. Perlu diingat bahwa hujan bukan merupakan satu-satunya faktor pemicu bencana. BMKG selalu memberikan info awal tentang potensi terjadinya bencana dalam bentuk peringatan dini hujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan longsor. Namun, selama lingkungan kita siap menerima,

menyerap, dan mengalirkan air, tentu banjir tidak akan terjadi. Layanan informasi BMKG ditujukan untuk berbagai sektor, termasuk sektor kebencanaan. Kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat daerah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kepolisian, dan TNI. Info yang kita sampaikan berlapis, mulai dari peringatan dini per jam sampai dengan info jangka panjang tentang iklim. Harapannya, informasi ini membantu rekan-rekan yang bertugas di bidang penanganan kebencanaan supaya lebih bersiap siaga.

Apa saja media layanan informasi yang digunakan?

Channel diseminasi kami antara lain *email*, *website*, dan *social media*. *Follower* akun twitter BMKG hampir 4 juta dan aplikasi kami sudah diunduh 1,5 juta kali. Selain itu, kami memanfaatkan unit kerja di daerah guna bisa menjangkau masyarakat di pelosok dan perbatasan. Kerja sama lainnya dilakukan dengan radio pemerintah, radio swasta, serta berbagai komunitas seperti nelayan, petambak, dan petani. Di kota Makassar, kami memiliki program siaran radio menggunakan bahasa Bugis. Itu adalah bentuk kerjasama kami dengan koperasi nelayan dan radio lokal. Lalu, dalam kaitannya dengan literasi dan *public education*, kami menyelenggarakan program Sekolah Lapang.

Apa saja program Sekolah Lapang?

Program Sekolah Lapang terdiri atas Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Meteo Maritim. Untuk Sekolah Lapang Iklim, kami membuka kelas di sawah dan bertemu dengan para petani dan penyuluh pertanian tiap seminggu sekali selama tiga bulan. Mereka diedukasi tentang bagaimana cara melakukan pengamatan cuaca secara umum, membaca informasi dari BMKG, serta memanfaatkan info cuaca untuk bertani. Program ini sudah dilaksanakan sejak 2012 dan ditanggapi antusias oleh masyarakat. Dari sisi sebaran provinsi, program ini dilakukan merata di hampir seluruh Indonesia. Produksi padi di daerah yang mendapat program ini juga bisa meningkat hingga 50 persen. Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tercatat produksi padinya naik dari 6 ton per hektar menjadi 9 ton per hektar.

Apakah teknologi yang saat ini dimiliki BMKG sudah dirasa mencukupi kebutuhan?

Dari sisi kebutuhan minimum, peralatan BMKG belum dirasa cukup ideal. Misalnya, alat radar cuaca untuk mendeteksi awan. Radius jangkauan *scanning* alat ini sekitar 100 sampai 150 km. Dengan kata lain, untuk bisa meng-*cover* seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan setidaknya 60 radar. Akan tetapi,



A. Fachri Radjab, Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Foto
Anas Nur Huda

saat ini BMKG baru mempunyai 41 buah. Sebagian diantaranya bahkan merupakan generasi pertama yang berusia sekitar 12 tahun dan sudah waktunya untuk diganti. Kami berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, tetapi tentu dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

Bagaimana bentuk kerjasama BMKG dengan instansi lain dalam penanganan bencana?

Dalam konteks penanganan bencana, BMKG lebih di sisi kesiapsiagaan. Kami memberikan informasi dini tentang potensi bencana baik itu hidrometeorologi maupun geologi. Informasi prakiraan hujan dan peringatan dini secara rutin dikirim ke instansi lain antara lain BNPB dan BPBD sehingga mereka bisa lebih bersiap siaga.

Pemda juga merespon baik informasi dari kami, misalnya dengan menebang pohon di kawasan tertentu. Contoh lainnya, Pemda DKI membuat Surat Edaran Gubernur tentangantisipasi demam berdarah saat memasuki musim penghujan ini. Kami juga bekerja sama dengan mereka dalam membangun aplikasi *early warning* demam berdarah berdasarkan curah hujan.

Saat ini BMKG bersama instansi-instansi lain sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana atau *Multi-Hazard Early Warning System*. BMKG berpartisipasi dengan menyusun peraturan tentang berbagai potensi bencana serta peringatan dini. Dari sisi teknis pelaksanaan operasional, BMKG mengikuti pedoman World Meteorological Organization (WMO) untuk mengembangkan *Impact Based Forecast* atau prakiraan cuaca berbasis dampak. Jika dulu prakiraan cuaca hanya menjelaskan angka-angka, misal suhu 21 derajat atau kelembapan 80%, kini kami harus bisa menjelaskan arti angka-angka itu dan apa saja dampaknya. Kami sedang mengembangkan ini bersama BNPB. Harapannya, nanti kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang rawan bencana banjir. Kita bedakan dalam skala

warna kuning, oranye, dan merah. Warna merah berarti sudah harus evakuasi.

Menurut Anda, sejauh ini bagaimana budaya sadar bencana masyarakat Indonesia?

Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bencana merupakan tantangan tersendiri. Harapan kami, informasi yang dikeluarkan BMKG bisa diterjemahkan menjadi *knowledge* oleh masyarakat. Lalu lebih jauh lagi, *knowledge* itu menjadi *culture*.

Akan menjadi percuma informasi prakiraan cuaca bagus, peringatan dini akurat, dan peta kerawanan bencana lengkap, jika masyarakat masih membuang sampah di sungai. Selama ini penyebab banjir bisa dikatakan bukan karena hujan, tetapi justru lantaran sungai tertutup sampah. Kita perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tingkat kepedulian pemerintah juga perlu ditingkatkan, terutama agar aspek kesiapsiagaan bisa lebih menjadi perhatian.

Apa pesan Anda kepada masyarakat terkait bencana karena faktor gejala alam?

Kenalilah lingkungan sekitar dan bersahabatlah dengan alam. Mengutip perkataan Kepala BNPB, “Kita jaga alam, alam jaga kita”. Itulah kunci dari *living harmony* atau hidup harmoni bersama alam. Potensi bencana hidrometeorologi sangat besar, yakni mencapai 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia. Jadikan informasi cuaca ini sebagai referensi keseharian, lalu beradaptasilah dengan kondisi cuaca yang terjadi. Yang jelas, keragaman dan kedinamisan cuaca iklim di Indonesia itu adalah bentuk rahmat dan berkah. Ambillah manfaat dari berkah tersebut. Satu lagi, kami juga berharap pemerintah pusat dan daerah menjadikan informasi cuaca sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, terutama sebelum melakukan program pembangunan di suatu daerah.

Teks Reni Saptati D.I

Anda butuh konsultasi terkait Tugas dan Fungsi DJPK yang EFEKTIF dan EFISIEN dipandu dengan narasumber kompeten?

VidconDJPK

Konsultasi Masa Kini

Info lebih lanjut melalui
Dering DJPK:

1500420

www.djpk.kemenkeu.go.id

Integritas Tanpa Batas

Dedi Syarif Usman

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.



Foto
Ferdian Jati

Slepas Sekolah Menengah Atas, sesosok pemuda sempat bimbang memilih jurusan untuk strata satunya. Sempat melanjutkan pendidikan di teknik industri

selama setahun, ia pun berpindahhaluan ke jurusan akuntansi yang juga menjadi saran dari kedua orang tuanya. Ayahnya yang memiliki latar belakang auditor pun menjadi sosok inspiratif baginya. Tak hanya menjadi tempat berdiskusi dari sisi akademis, sosok ayah juga mengajarkan bagaimana menjaga integritas dengan baik. Pernah suatu ketika saat ia berdinass pertama kalinya ke luar kota, sang ayah berpesan untuk selalu tahan terhadap godaan.

“Bapak saya berpesan ‘Jangan kamu sekali-kali mau menerima suap. Kalau sekali mau, akan ketagihan’. Jadi alhamdulillah selama saya bertugas tidak pernah ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Dulu kita mengalami waktu masih BUPN (Badan Urusan Piutang Negara), kita terus terang *aja* yang namanya kalau kita mau menyita agunan jaminan debitur, wah itu macam-macam godaannya, uang, perempuan, segala macam. Alhamdulillah kita bisa lewati,” ceritanya sembari mengenang.

Keputusan untuk mengambil jurusan akuntansi bukanlah tanpa alasan. Sang ayah juga merupakan lulusan akuntansi dari Sekolah Kedinasan Departemen Keuangan (sekarang PKN STAN) tahun 1965. Menurut sang ayah, semua perusahaan kala itu pasti membutuhkan jasa akuntan. Hal itulah yang membuat pemuda tersebut akhirnya luluh dan menuruti harapan sang orang tua. Ia pun bersyukur karena merasa berada dalam jalur yang sesuai dengan keinginannya. Harapan kedua orang tuanya pun menjadi doa yang dikabulkan. Ialah Dedi Syarif

Usman, sosok pemuda yang kini menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Pengalaman menarik

Bercerita mengenai pengalaman menarik saat bekerja di Kementerian Keuangan, Dedi menceritakan saat dirinya pertama kali memimpin Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Tegal pada tahun 2002 yang saat ini berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal. Kala itu, ia belum memiliki kantor permanen karena masih baru sehingga ia dan para pegawainya pun masih berkantor di Semarang, dan 3 bulan kemudian menyewa kantor di Tegal.

Setahun kemudian, Dedi harus melakukan pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor barunya. Tak disangka, pada tahun 2003 terbit Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang menjadi tantangan saat itu adalah belum ada pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa seperti saat ini. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya penyalahafsiran peraturan.

Menghadapi hal tersebut, ia menguatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan harapan dapat meminimalisasi risiko yang ada. “Jadi rupanya memang ada suatu ketentuan kalau pemerintah ingin mengadakan tanah untuk kepentingan pelayanan publik, maka tidak perlu melalui akta jual beli namun cukup melalui pelepasan akta.

Sampai kantor itu dibangun, Alhamdulillah pemeriksaan Itjen, pemeriksaan BPK, kita tidak ada masalah. Kita selalu konsultasi dengan Irjen, dengan kawan di BPK,” ceritanya.

Selain itu, pengalaman menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kerja (Ortala) di Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga memberikan kesan tersendiri baginya. Pada Oktober 2007, setelah keputusan remunerasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ia dan para pejabat lainnya diundang bersama Sekretaris dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mendengarkan paparan seorang konsultan *balanced scorecard* yang bernama Suwardi Luis.

“Ternyata ibu Menteri Keuangan ingin mengimplementasikan *performance management* di Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan *balance scorecard*. Saya bilang ini luar biasa karena belum semua perusahaan swasta menerapkan itu,” jelasnya.

Sebagai contoh, ternyata pada saat ia pindah menjadi Direktur KND, penilaian kinerja BUMN-BUMN di bawah Kementerian Keuangan belum menggunakan *balance scorecard* sepenuhnya. Jadi (mereka) hanya menyampaikan RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Penerapan *balance scorecard* di Kemenkeu yang akan menjadi kontrak kinerja menciptakan keseimbangan antarperspektif yang tidak hanya finansial perspektif saja.

“Kalau *balance scorecard* itu ada 4 perspektif. Ada finansial perspektif, ada *customer* perspektif, ada proses bisnis, dan ada *internal learning*. Kita pun tiap tahun melaksanakan itu. Jadi semenjak saya direktur di sini, saya terapkan ke seluruh BUMN dibawah Kemenkeu untuk selain



Berkumpul bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi

menyusun RKAP tahunan juga membuat kontrak kinerja dengan pendekatan *balance scorecard*,” jelasnya.

Selain itu, dalam rangka reformasi birokrasi tahun 2009 ada kewajiban baru untuk menerapkan *risk management*. “Sampai sekarang pun itu masih dilaksanakan. Itu juga kembali menimbulkan kebanggaan dan semangat kita bekerja di Kemenkeu karena yang mempunyai kewajiban menerapkan *risk management* berdasarkan regulasi itu hanya perbankan. Industri lain saat itu belum ada, walaupun sekarang hampir semua korporasi atau perusahaan menerapkan *corporate risk management*,” ujarnya.

Tugas yang menarik lainnya adalah tahun 2015 dalam APBN Perubahan terdapat tambahan Pernyataan Modal Negara (PMN) kepada 40 BUMN dengan nilainya sebesar Rp64 triliun. Itu menjadi nilai PMN terbesar sepanjang sejarah pemerintah Indonesia. “Kenapa sangat berkesan karena 40 BUMN tersebut untuk mendukung Nawacita. Dari mulai ketahanan energi, ketahanan pangan, sama infrastruktur. Misalnya ketahanan energi kan ada PMN kepada PLN. Kemudian infrastruktur ada PMN kepada Utama Karya untuk membangun tol transsumatera. Kemudian ketahanan pangan ada PMN kepada Bulog kepada PTPN untuk membangun industri gula,” ceritanya.

I-Prospek

Terkait dengan nilai dan moto hidup, Dedi mengatakan bahwa motonya konsisten dan selaras dengan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan, yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan atau disingkat I-Prospek. Ia mengambil tiga nilai utama yang mencerminkan dirinya, yaitu integritas, komitmen, dan ketulusan.

“Kalau saya nilai yang utama selalu integritas, komitmen dan ketulusan. Kenapa integritas? Saya terkesan dulu waktu kuliah S2 di Amerika. Di sana ada iklan dari militer AU sama AL. Iklannya itu keren banget, jadi misalnya itu *airforce*. *Airforce* itu slogannya ‘*integrity first*’,” ceritanya.

Lebih jauh, menurutnya, integritas atasan dapat diwujudkan melalui *role model* yang baik untuk bawahan. Misalnya, mulai tahun ini, Direktorat KND memiliki komitmen untuk menjadi Direktorat Wilayah Bebas dari Korupsi. “Jadi dari awal kita buat *announcement* kepada *stakeholder* kita, lalu membuat survei apakah selama ini pelayanan kita terdapat tindakan yang bertentangan dengan kode etik atau integritas atau tidak,” ujarnya.

Lima - Dua

Terkait dengan keluarga, Dedi menceritakan sistem membagi waktu bersama keluarganya. “Karena lima hari itu *full* kerja disini rata-rata malam paling cepat sampai rumah setelah isya. Sabtu minggu saya harus *full* keluarga. Jadi sistemnya lima-dua, lima untuk kantor dan dua untuk keluarga. Tapi kadang-kadang kalau sudah rapat minggu saya harus datang, tapi kalau tidak ada rapat saya penuh dua hari untuk keluarga. Jadi selalu dua untuk keluarga bahkan waktu anak saya yang nomor dua sekolah di Bandung, saya tiap 2 minggu sekali ke Jatinangor. Bolak balik terus tidak apa-apa,” ceritanya.

Harapan

Terkait harapan, Dedi memiliki harapan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk dapat memenuhi ekspektasi dari para *stakeholders*. Ia bercerita merasa ingin lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Misalnya, dibandingkan dengan analis dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), ia berharap tempatnya dapat juga lebih meningkatkan kontribusi dalam bentuk kajian terutama mengenai performa BUMN/BLU.

“Kita ingin temen-temen semua disini menjadi analis-analis yang setara dengan BKF. Makanya nanti SDM KND akan *Secondment* tidak hanya di BUMN di bawah Kemenkeu, tetapi juga misalnya di (perusahaan) dana reksa, bahana sekuritas, mandiri sekuritas, supaya temen-temen juga paham analis-analis keuangan yang terbaik,” tutupnya.

Teks Abdul Aziz

Program *Secondment* Dalam Sinergi DJP - DJBC

Mohammad Windu Darmawan,
Aparatur Sipil Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Untuk mewujudkan visi sebagai institusi yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh pada seluruh proses bisnisnya.

Salah satu aktualisasi komitmen tersebut adalah diimplementasikannya Program Sinergi Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan kepada Wakil Menteri Keuangan, yang secara khusus, diberikan mandat untuk mengkoordinasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memenuhi target penerimaan negara.

Program Sinergi diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sinergis antara DJP – DJBC guna mendukung upaya penerimaan negara yang optimal. Kegiatan sinergis yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*, *joint investigation*, *joint* proses bisnis, *single profile*, dan *secondment*. Sinergi yang erat antarinstitusi perpajakan terlihat dalam *joint analysis*. Program ini menganalisis data perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan yang secara otomatis terkait juga dengan data perpajakannya. Selain itu, program sinergi juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh DJP dan DJBC sesuai kewenangan masing-masing.

Salah satu *breakthrough* program sinergi pada 2018 adalah pelaksanaan program *secondment*. Program ini memungkinkan pertukaran pejabat maupun pegawai antara DJP dengan DJBC. Penugasan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan

tujuan tertentu Adapun

tugas dan pengawasan yang berlaku disesuaikan dengan unit organisasi yang ditempati. Dalam hal ini, pejabat atau pegawai dari DJP yang bertugas di kantor DJBC dalam waktu tertentu, maka mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan penugasan di kantor yang dituju. Begitu juga sebaliknya. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-9/MK.01/2017 tentang Program *Secondment* Kementerian Keuangan.

Program *secondment* merupakan program pertukaran terbesar di Kemenkeu. Sebab, melibatkan 100 orang *seconded* dan 23 orang *mentor*, baik berasal dari DJP maupun DJBC. Tempat pelaksanaan *secondment* atau *host* untuk masing-masing bidang *secondment* tersebar di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), serta Direktorat di DJP maupun DJBC yang ditunjuk. *Host* tersebar di 13 Kota/



Ilustrasi Dimach Putra

Program *secondment* merupakan program pertukaran terbesar di Kemenkeu. Sebab, melibatkan 100 orang *secondee* dan 23 orang mentor, baik berasal dari DJP maupun DJBC.

Kabupaten di 5 Provinsi di seluruh Indonesia.

Tujuan utama dari *secondment* adalah mendorong terwujudnya komitmen yang kuat terhadap pertukaran data, integrasi regulasi dan proses bisnis, serta *transfer knowledge* dan *enrichment* program sebagai salah satu bentuk pengembangan pegawai di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, *secondment* juga bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pertukaran data dan informasi, memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, serta meningkatkan kinerja organisasi. Diharapkan pelaksanaan kegiatan *secondment* dapat menunjang pelaksanaan inisiatif sinergi DJP-DJBC lainnya. Dengan demikian berdampak pada semakin optimalnya pemenuhan target penerimaan negara.

Secondment pada 2018 secara riil telah menghasilkan *outcome* yang signifikan. Utamanya, pada perbaikan proses bisnis pengelolaan penerimaan perpajakan. Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah analisis bersama yang dilakukan *secondee* berupa *cleansing* terhadap data Wajib Pajak yang telah melunasi cukai, tetapi tidak membayar PPN Hasil Tembakau. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan penagihan terhadap perusahaan rokok yang tidak membayar PPN Hasil Tembakau. Total realisasi penerimaan dari *joint analysis* terhadap pengawasan Wajib Pajak rokok dan MMEA adalah sebesar Rp1,66 triliun.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen, dukungan, dan kepercayaan para pimpinan DJP-DJBC kepada para *secondee* langsung untuk berpartisipasi melakukan analisis bersama. Selain itu, komitmen pimpinan terlihat pada dukungan mereka terhadap mekanisme program *secondment* dengan menempatkan *secondee* ke dalam satu tim. Penempatan pada satu tim ini selain dapat menghasilkan suasana kerja yang kondusif dan membaaur, juga memungkinkan kolaborasi aktif antarinstansi untuk mencapai target penerimaan dari program sinergi.

Selain perbaikan pada proses bisnis, *secondment* DJP dan DJBC memberi dampak pada peningkatan kompetensi *human capital* perpajakan yang terlibat dalam program. Selain itu, program ini secara alamiah akan mendorong peningkatan pemahaman *secondee* atas proses bisnis unit vertikal di lokasi *secondment*. Sementara itu, dari sisi unit penerima, program *secondment* akan memicu peningkatan kompetensi pegawai melalui kolaborasi yang produktif, guna mengeksplorasi pengelolaan perpajakan dari sisi pajak dan kepabeanan. Melalui kegiatan tersebut, dirumuskan berbagai pokok masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya dihasilkan rekomendasi perbaikan

serta penguatan yang perlu dilakukan di masing-masing unit. Rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai masukan oleh Tim Sinergi Reformasi DJP-DJBC didalam menyusun *joint* proses bisnis kedepan.

Berkaca pada capaian menggembirakan di tahun sebelumnya, pada 2019 Tim Sinergi berkomitmen untuk terus menyempurnakan program sinergi DJP-DJBC dengan mengedepankan digitalisasi *profiling* Wajib Pajak dan Pengguna Jasa. Digitalisasi *profiling*

tersebut didukung

oleh pemanfaatan *big data*, sehingga menjangkau cakupan sasaran yang lebih luas dan merata. Lebih lanjut lagi, diharapkan berbagai program sinergi yang telah dilaksanakan saat ini dapat dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkoneksi antara DJP,

DJBC dan seluruh unsur terkait di Kemenkeu. Pengakomodasian berbagai program sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong proses pengukuran dan pencatatan perkembangan capaian program secara periodik dan lebih terstruktur.

Lesson learned implementasi Program Sinergi DJP-DJBC selama ini adalah telah terbangunnya *trust level* sebagai modal berharga bagi kinerja Kemenkeu yang lebih baik di masa mendatang. Rasa saling percaya antarunit di Kemenkeu akan berpengaruh pada proses bisnis secara positif, didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif, serta sinergi yang semakin baik karena sikap saling terbuka dan saling dukung. Dengan demikian, proses pertukaran informasi menjadi lebih lancar dan mudah, sehingga dapat ditemukan solusi bersama atas permasalahan yang ada.

Keseriusan implementasi yang dibarengi komitmen pimpinan dari level atas hingga level satuan kerja

KPP dan KPPBC, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, memberikan andil pada kesuksesan program *secondment*. Upaya tersebut mendorong secara efektif peningkatan pemahaman seluruh pegawai di wilayah kerja dan menghilangkan *silos* serta ego sektoral. Hal ini selanjutnya mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan perspektif yang kaya dalam pengelolaan penerimaan negara yang lebih baik.

Peluang pengembangan program *secondment* di masa mendatang masih sangat terbuka. Apalagi dengan potensi para *expertise* perpajakan di Kemenkeu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan di masa mendatang adalah kegiatan kunjungan bersama ke Wajib Pajak, melalui pertemuan formal dan informal, untuk melakukan *brainstorming* terhadap penggalian potensi penerimaan negara. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif berupa *transfer of knowledge* antaraparatur perpajakan yang berasal dari berbagai latar belakang medan tugas dan permasalahan berbeda.

Sementara itu, potensi penerimaan negara dari program sinergi di *targeted location*, seperti di Malang, Tanjung Priok, dan Batam dapat lebih meningkat apabila mekanisme program *secondment* dilaksanakan secara *fully dedicated*. Melalui pendekatan ini, diharapkan fokus kerja para *secondee* meningkat sehingga mampu memberikan hasil kerja yang optimal. Salah satu tantangan pelaksanaan yang teridentifikasi dari pelaksanaan program *secondment* selama ini adalah para *secondee* masih harus menyelesaikan pekerjaan di kantor asal. Kondisi tersebut disebabkan belum adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ketika ditugaskan untuk mengikuti program *secondment*.

Pada akhirnya, jika pelaksanaan Program Sinergi terus dijaga dan dikembangkan secara *proper*, serta

didukung dengan sumber daya yang memadai, maka *outcome* berupa tingginya kesadaran Wajib Pajak dan Pengguna Jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah keniscayaan. Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menyampaikan laporan terkait keberlangsungan kegiatan usaha kepada Bea Cukai. Sebagai ilustrasi, Wajib Pajak industri rokok akan patuh pada pelunasan cukai. Sebab, Wajib Pajak memiliki kepentingan untuk memperoleh pita cukai agar produknya dapat dijual di seluruh wilayah Negara Indonesia secara legal.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang signifikan pada 2020 menjadi sasaran Program Sinergi yang perlu terus diupayakan. Kondisi tersebut sebagai bentuk kontribusi riil Program Sinergi dalam

membentuk ekosistem perpajakan yang sehat dan ideal bagi negara dan masyarakat. Selain itu, perpaduan antara ekosistem pengelolaan perpajakan yang ideal, didukung kinerja DJP dan DJBC dalam mengamankan keuangan negara melalui pemungutan pajak secara adil, pemberian layanan yang baik, serta kemudahan fasilitas bagi pengguna jasa, akan menggerakkan perekonomian di Indonesia secara lebih cepat.



Beleid DP Nol Persen dan Harmoni Kebijakan

Joko Tri Haryanto,
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 membuka peluang penurunan uang muka (*down payment*/DP) pembiayaan kendaraan bermotor menjadi nol persen untuk perusahaan *multifinance* yang mencatat rasio kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) di bawah 1%. Bab IV aturan tersebut menjelaskan lebih detail mengenai aturan Uang Muka Pembiayaan melalui skenario-skenario yang memungkinkan konsumen mendapatkan tingkat suku bunga pinjaman untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Dasar pengaturan skenario penetapan suku bunga tersebut tentu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya mengurangi gagal bayar dari konsumen.

Penurunan uang muka tersebut ditujukan untuk terus menggairahkan industri otomotif sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Pemerintah sendiri masih belum merevisi target produksi kendaraan bermotor pada 2019 sebesar 1,1 juta kendaraan. Dalam beberapa tahun ke depan, produksi kendaraan bermotor di Indonesia bahkan diharapkan mampu menyalip produksi kendaraan Thailand serta beberapa negara ASEAN lainnya.

Dari sisi penerimaan devisa negara,

rencana kenaikan produksi industri otomotif tersebut memang akan menguntungkan bagi kenaikan PDB Indonesia. Namun sayangnya, kebijakan tersebut juga wajib diselaraskan dengan upaya penanggulangan darurat kemacetan di beberapa kota besar, terlebih di ibu kota Jakarta. Kompleksitas permasalahan kemacetan ibu kota memang sudah sedemikian akut. Bahkan beberapa pengamat memprediksi Jakarta akan dilanda kelumpuhan transportasi pada 2020, jika tidak segera dikeluarkan kebijakan yang bersifat revolusioner.

Begitu dramatisnya penggambaran kondisi

tersebut, sampai-sampai masyarakat diyakini akan langsung dihadang kemacetan begitu keluar dari halaman rumah masing-masing. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, terlebih dengan status Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat aktivitas ekonomi negara.

Prediksi kelumpuhan transportasi di Jakarta memang cukup beralasan. Terlebih menilik angka pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor

di Jakarta yang terus meningkat drastis. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, penambahan jumlah kendaraan bermotor pribadi setiap harinya mencapai 6 ribu unit. Dengan rasio jalan hanya sekitar 7 persen dari total luas daratan di DKI Jakarta, tak heran jika masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk rute yang tidak terlalu jauh.

Merdeka atau macet

Usai penghapusan *three in one*, Pemda DKI Jakarta saat ini sedang menjalankan kebijakan pembatasan nomor kendaraan pribadi ganjil genap. Ide ini sejukurnya sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah terealisasi dengan berbagai kendala. Meskipun terlambat, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut relatif rendah biaya. Kebijakan ini juga akan mereduksi jumlah kendaraan bermotor yang melintas di ibu kota setiap harinya hingga 50 persen. Itu artinya sama dengan potensi pengurangan angka kemacetan yang signifikan.

Berdasarkan hitungan simulasi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2014 yang mencapai 17,5 juta unit, maka kendaraan bermotor yang akan meroda di Jakarta setiap harinya dari pengaturan ganjil genap dibatasi sekitar 8,7 juta unit di beberapa ruas jalan tertentu. Insentif menjadi makin menggiurkan ketika dikaitkan dengan biaya-biaya dampak kemacetan serta penghematan belanja APBN. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut menjawab *statement* Bank Dunia tentang permasalahan kemacetan di DKI Jakarta. Kemacetan tersebut dianggap menghilangkan potensi produktivitas penduduk hingga Rp39,9 triliun dalam setahun.

Bank Dunia juga menyimpulkan bahwa kemacetan adalah buah dari

perencanaan urbanisasi yang tidak terkonsep dengan baik. Di China, 1 persen kenaikan urbanisasi mampu berkontribusi 10% terhadap peningkatan PDB negaranya. Sementara di Indonesia, pertumbuhan 1 persen urbanisasi, hanya mampu menyumbang pertumbuhan PDB sekitar 4 persen. Persoalan menjadi makin rumit begitu selesai bulan Ramadan dan Lebaran. Ribuan kaum pemudik datang kembali ke Jakarta dengan membawa sanak familinya.

Gelombang urbanisasi ini seperti sudah menjadi agenda rutin yang selalu menghiasi Lebaran setiap tahunnya. Meskipun berat dengan problematika kota, Jakarta tetap menjadi impian bagi kaum urban. Menurut data Pemprov DKI Jakarta, jumlah pendatang baru yang masuk mencapai hampir 70 ribu jiwa, naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 ini, beberapa pengamat bahkan meyakini gelombang urbanisasi yang masuk ke Jakarta akan lebih banyak lagi.

Persoalan klasik tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar tahunan bagi Pemprov DKI Jakarta. Sejujurnya, perlu disadari bersama bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan dapat menanggulangi permasalahan urbanisasi sendirian. Harus dibangun komunikasi yang intensif dengan beberapa daerah penyangga demi meratakan daerah tujuan urbanisasi. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa pesatnya pertumbuhan daerah di pinggiran Jakarta seperti Depok, Bogor dan Bekasi akan turut andil mengurangi angka urbanisasi di DKI Jakarta. Jika sudah demikian, konsep *agglomerasi* megapolitan tampaknya memang menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

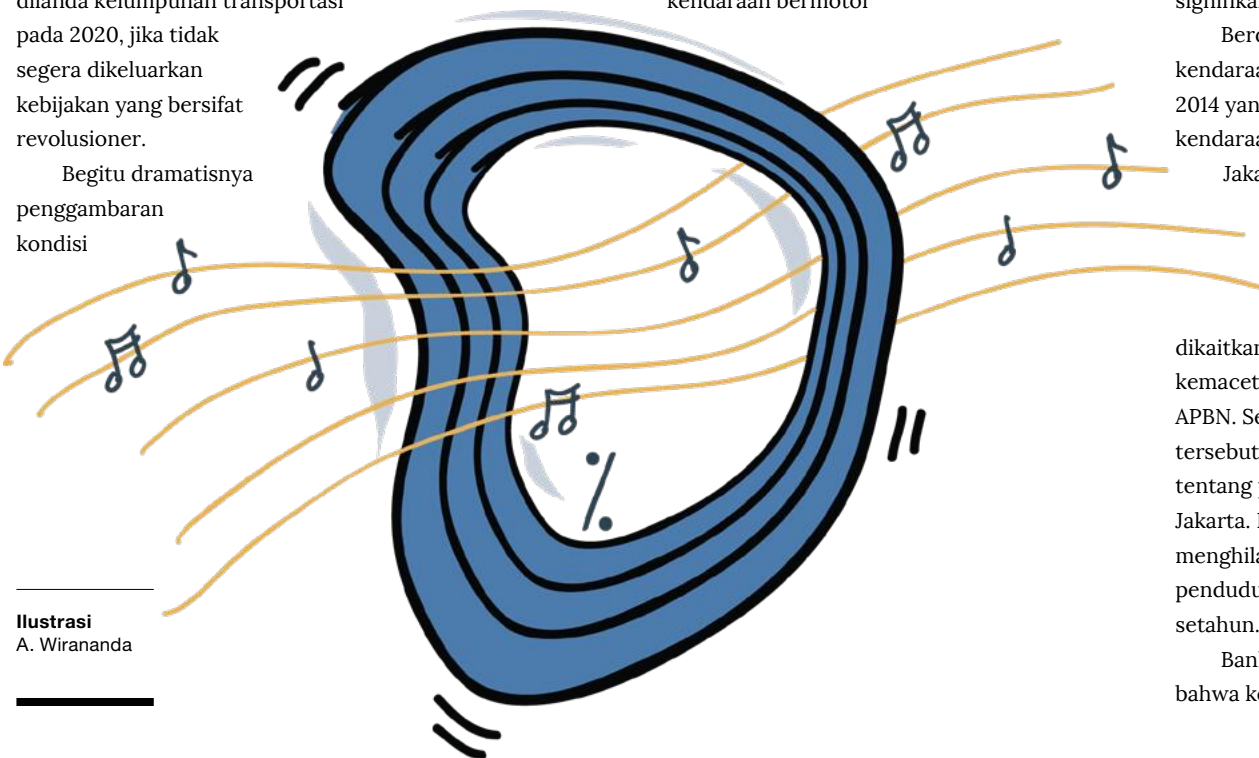
Di mata penulis, peran terpenting justru ada di tangan pemerintah pusat. Bagaimana memajukan ekonomi di daerah-

daerah penyangga ibu kota adalah tugas utama pemerintah pusat. Mempercepat laju pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta juga menjadi agenda yang dapat dibagi dengan pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat juga penting dalam menciptakan diversifikasi struktur ekonomi penduduk.

Dari sisi anggaran, banyak kebijakan yang telah digelontorkan ke daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Sejak tahun 2019 pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan. Dalam komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah juga sudah melakukan reformasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Melihat banyaknya alokasi pendanaan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, sinergi kebijakan antar daerah dan pemerintah pusat tampaknya menjadi kata kunci seluruh keberhasilan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat justru berlawanan dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah atau sebaliknya. Sebagai contoh kebijakan terkait industri otomotif di0 atas. Jika seluruh pihak yang terlibat mampu menghilangkan ego masing-masing serta bekerja dengan tujuan yang sama, penulis yakin bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara besar. Jika tidak, tinggal pilih mau merdeka atau macet?

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



Ilustrasi
A. Wirananda

KPP Pratama Tahuna, Kepulauan Sangihe

Candradimuka di Tubir Samudera

Bekerja di Kementerian Keuangan datang dengan satu syarat yang cukup berat. Bersedia ditempatkan di penjuru nusantara menjadi kalimat yang cukup membuat ragu mereka yang ciut nyalinya. Bagi beberapa unit yang memiliki kantor vertikal di daerah, kalimat tersebut dianggap momok yang selalu mengintai kapan saja. Jika bisa memilih, siapa yang mau meninggalkan zona nyamannya untuk mengabdikan ke pelosok negeri? Apalagi jika lokasi penempatannya terdapat di daerah yang cukup terisolasi.

Tahuna adalah sebuah kota kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kepulauan Sangihe. Area yang masuk pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara ini terletak di lepas pantai sebelah utara Pulau Sulawesi. Wilayahnya meliputi pulau-pulau kecil yang tersebar di bibir Samudera Pasifik dan berbatasan langsung dengan perairan Filipina. Di ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe ini berdiri gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tahuna.

Kantor yang berdiri kokoh dan terlihat megah ini membawahi wilayah kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tantangan kantor ini tak hanya dari

letaknya saja, tapi juga kondisi alamnya. Berada di tengah laut, ombak tinggi sudah jadi makanan sehari-hari. Transportasi antar pulau harus ditempuh berjam-jam menggunakan kapal dan perahu. Untuk ke pulau utama bisa dicapai menggunakan pesawat rintisan, namun jadwal terbangnya hanya dua hari sekali. Adanya lempeng aktif di dasar laut kepulauan ini sering menyebabkan gempa yang bisa berpotensi tsunami.

Kepatuhan dalam keterbatasan

Terletak di daerah yang lumayan terisolasi membuat kantor ini harus berhadapan dengan segala keterbatasan. Bisa dibayangkan bahwa masyarakat yang tinggal di kepulauan terluar di Indonesia ini pun menjalani kehidupan sehari-harinya dengan cara yang masih cukup tradisional. Hal tersebut sudah disadari oleh Miftahudin, Kepala KPP Pratama Tahuna, bahkan sebelum dirinya memulai masa kepemimpinannya di kantor ini. Ia sadar bahwa dirinya harus mampu berperan sebagai imam, memimpin dan memberi teladan terbaik bagi segenap stafnya.

Kondisi geografis daerah ini yang cukup menantang berakibat pada terbatasnya koneksi jaringan. Ketika



Gedung KPP Pratama Tahuna

Pegawai KPP Pratama Tahuna memeriksa hasil tambang emas

Foto Dok. KPP Pratama Tahuna

Miftahudin, Kepala KPP Pratama Tahuna

Foto Resha Aditya Pratama



teknologi bukan sebuah opsi utama, cara-cara sederhana pun diterapkan dalam menjawab masalah. Miftahudin mengakui bahwa proses yang harus dilalui jajarannya tidak mudah. Mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu untuk memahami kondisi di lapangan sebelum memberi edukasi bertahap dengan beragam cara pendekatan yang halus. "Nggak bisa langsung pak-pik-buk wae. Beda sama

di Jawa, sekali *ngomong* sudah (paham) teknologi dan dibantu macam-macam inovasi," ungkapnya.

Tantangan KPP Tahuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak hanya datang dari jenis wajib pajak (WP) yang masih tradisional. Tidak hanya perseorangan saja, instansi-instansi di sana pun masih banyak yang gagap teknologi. "Semuanya pada TBC, alias tidak bisa *computer*", seru Mifta berkelakar. Tapi dirinya sangat bersyukur karena didukung tim yang berdedikasi tinggi "Untungnya teman-teman di sini itu sabar membimbing. Didampingi terus dari *gak* paham sampai bisa mandiri."

Kegigihan seluruh jajaran dalam memberikan pendampingan membuahkan hasil. Kantor ini berhasil mencatat persentase Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan Terbaik Tahun 2017 tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. "Saya selalu mengingatkan bahwa *small is beautiful*. Saya targetkan pada teman-teman, ini kecil, jadi harusnya sudah bisa terawasi, teridentifikasi dan terlihat, sehingga bisa tersentuh semua," paparnya.

Candradimuka bernama Tahuna

Satu hal yang mungkin dirasa kurang oleh Kepala Kantor terhadap organisasi yang dipimpinnya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). KPP Pratama Tahuna saat ini didukung oleh 58 pegawai, dan hanya dua orang saja yang merupakan pegawai perempuan. Hal tersebut disayangkan Miftahudin, namun mengingat lokasi geografis yang menantang, dirinya bisa memaklumi. "Itu pun yang perempuan orang sini, kalau dari luar kan kasihan juga, Mas," akunya.

Terkait masalah SDM, pembagian organisasinya pun dinilai kurang ditata secara maksimal. Pada umumnya KPP di tempat lain memiliki Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) hingga empat. Namun di kantor ini hanya terdapat dua, satu seksi khusus menangani pelayanan konsultasi, lainnya fokus ke pengawasan para WP.

"Mungkin lebih baik jika ditambah satu Waskon lagi. Itu akan muncul persaingan sehat. Kalau di tempat lain bisa tiga kan, jadi antar Kasi, antar-AR (*account representative*) terpacu untuk lebih menggali potensi di sini," ungkap Miftahudin berandai-andai. Ia menganggap keinginannya itu tidak terlalu muluk melihat kondisi geografis wilayah kerja KPP Pratama Tahuna yang terdiri dari beberapa kepulauan yang tersebar di laut lepas. Luasnya wilayah tersebut menyimpan potensi WP yang belum tersentuh karena keterbatasan personel dan susahnyanya medan.

Miftahudin berharap bahwa seluruh pegawai dapat menjadikan pengalaman mengabdikan di KPP Pratama Tahuna ini sebuah pelajaran menempa diri. Meski di tengah keterbatasan, ia selalu berusaha untuk dapat mengakomodir stafnya untuk terus mengembangkan kemampuannya. "Saya tahu bahwa komitmen teman-teman di sini sangat tinggi. Mereka ini orang-orang berpotensi dan dipacu dengan semangat pengabdian yang tinggi. Sebagai pimpinan tugas saya hanya membantu untuk menemukan celah untuk terus berbenah, baik personal maupun untuk jenjang karir ke depannya," tutupnya mantap.

Teks Dimach Putra



Profesi

Seksi Pembiayaan Proyek SBSN

Tekun Merawat Amanat Rakyat

Menentukan taktik dan pola pergerakan bukan perkara sederhana bagi seorang manajer kesebelasan. Terlebih, ia mesti mengemban tanggung jawab atas target yang ditetapkan serta dibatasi dengan sumber daya yang tersedia. Semusim sekali, ia juga perlu mencari bibit-bibit baru yang potensial yang akan mengoptimalkan strateginya. Perlu kemampuan manajerial jitu untuk mengoptimalkan pencapaian. Serupa dengan seorang manajer kesebelasan, demikian pula yang sehari-hari dijalani Rachmad Faudji. Sebagai Kepala Seksi Pembiayaan Proyek SBSN, ia mesti jeli menentukan strategi dan kebijakan untuk proyek-proyek yang dibiayai.

Menjaga amanat

Sebagai pemegang amanat investasi syariah dari masyarakat, rencana pemanfaatan proyek yang dibiayai serta dampaknya bagi masyarakat tentu menjadi pertimbangan Rachmad sehari-hari. “Pemerintah dalam hal ini berperan juga sebagai wali amanat mewakili seluruh investor, oh akadnya untuk membiayai proyek,” katanya. “Karena itulah di samping mencari sumber pembiayaan, kami juga harus memastikan proyek ini benar-benar ada dan siap. Sehingga pembayaran imbalan sewa itu benar berjalan sesuai syariah,” ia melanjutkan.

Mengacu pada ketetapan Dewan Syariah Nasional, kriteria proyek setidaknya memuat aspek pemanfaatan dan analisis mashlahat. Sedangkan pemanfaatan proyek tersebut bukan untuk kontribusi terhadap perkara

ribawi, maysir, haram, serta mengandung mudarat terhadap akhlak maupun lingkungan. Selain itu, proyek yang dapat dibiayai menggunakan SBSN harus terlebih dulu mendapatkan alokasi dalam APBN. Pun, harus dipastikan bahwa aset tersebut tidak akan dipindahtangankan atau dihapuskan selama menjadi aset SBSN.

Selain pemahaman yang baik ihwal pemanfaatan pembiayaan syariah, pria kelahiran Banyuwangi ini membeberkan kompetensi yang perlu dimiliki Kepala Seksi Pembiayaan Proyek SBSN. “Banyak yang harus dikuasai. *Project management* tentunya, mulai dari penilaian kesiapan sampai dengan pelaksanaan. Pemahaman tentang penganggaran dan pencairan dana. Selain itu, kami perlu memahami juga proses pengadaan barang dan jasa,” katanya. Rachmad menegaskan pula perlunya merawat integritas karena besarnya tantangan dan

godaan dalam setiap proyek.

Kendati segala keputusan pembiayaan sudah diupayakan sebaik mungkin, tak berarti lantas pembiayaan proyek ini minim risiko. Salah satu risiko yang melekat adalah proyek tidak berjalan sebagaimana direncanakan. “Kalau ada proyek yang tidak siap dan tetap kita biayai, itu akan membebani APBN. Sebab pengeluaran pembiayaan proyek SBSN ini dalam rangka belanja. Makanya kita harus pastikan proyek ini benar-benar siap di awal. Itu risiko dari sisi fiskal ya,” katanya. Selain risiko fiskal, ia juga menegaskan adanya risiko hukum pada setiap kegiatan.

Menabur manfaat untuk rakyat

Sejak debutnya pada 2013, nilai total akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan saat ini telah mencapai 982 triliun rupiah. Produk ini terbagi menjadi 7 jenis instrumen antara lain Sukuk Ritel, *Project Based* Sukuk, dan Sukuk Dana Haji. Pada 2018, Seksi Pembiayaan Proyek SBSN mendanai sebanyak 587 proyek yang tersebar di 9 sektor. Jumlah ini meningkat menjadi 619 proyek yang tersebar di 14 sektor pada tahun 2019. Proyek-proyek yang telah selesai dibiayai SBSN antara lain adalah pembangunan Jembatan Musi IV yang menghubungkan kawasan Kuto dan Jakabaring, *underpass* Simpang Mandai di Makassar, serta *fly over* Laluan Madani di Batam. Selain yang telah disebutkan, SBSN telah mendanai pembangunan dan revitalisasi asrama haji di 24 lokasi, 701 kantor Kantor Urusan Agama, 57 perguruan tinggi, 32 sekolah madrasah, sejumlah sarana transportasi, proyek sumber

daya air, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium. Salah satu laboratorium hasil pendanaan SBSN adalah Laboratorium *Biosafety* Level 3 di kawasan Cibinong *Science Center-Botanic Garden*, kabupaten Bogor.

Pembiayaan proyek yang dikelola oleh Seksi Pembiayaan Proyek SBSN ini tercatat meningkat tiap tahun. Pada 2014 sebesar 1,57 triliun rupiah. Pada 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 7,13 dan 13,67 triliun rupiah. Nilai ini terus meningkat di 2017 menjadi 16,76 triliun rupiah. Hingga pada 2018 mencapai 22,53 triliun rupiah dan 28,43 triliun rupiah di 2019. Peningkatan pembiayaan yang terus meningkat ini tentu tanggung jawab yang berat bagi Rachmad dan timnya. Integritas perlu terus dipupuk, profesionalisme terus digenggam, dan sinergi mesti terus dipertahankan dalam harmoni.

Merawat amanat masyarakat selama lebih dari lima tahun bukan waktu yang singkat. Tanggung jawab fiskal dan moral memaksa Rachmad untuk tetap kuat. Ia bersama timnya terus memupuk semangat melalui setiap testimoni manis atas manfaat dari proyek yang dikelola. “Kalau proyek itu ter-*delivery* dan memberi manfaat yang baik, itu jadi kepuasan dan kebanggaan bagi kami,” pungkasnya. Ia berharap, kelak pembiayaan proyek SBSN dapat menjangkau lebih banyak sektor dan menghasilkan manfaat ke lebih banyak pihak. Kendati hal ini juga perlu diiringi dengan penguatan sumber daya pengelola pembiayaan proyek SBSN.

Teks A. Wirananda

Proyek yang dibiayai oleh SBSN

Foto Dok. DJPPR





Insentif bagi Devisa Hasil Ekspor yang Ditempatkan di Bank Dalam Negeri

Rivu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan pada Januari 2019 kembali mengalami defisit sebesar USD1,16 miliar, lebih tinggi dari posisi bulan sebelumnya USD1,03 miliar. Defisit neraca perdagangan disebabkan oleh impor yang mencapai USD15,03 miliar, lebih tinggi dari ekspor USD13,87 miliar. Selama tahun 2018, Neraca perdagangan Indonesia 2018 mengalami defisit USD8,57 miliar dibanding sebelumnya surplus USD11,8 miliar. Nilai impor yang tumbuh lebih kencang dari nilai ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan, antara lain dengan pemberian insentif fiskal dan efisiensi logistik.

Salah satu insentif yang diberikan Pemerintah agar eksportir agar menyimpan dananya di Indonesia adalah dengan pengenaan pemotongan pajak penghasilan khusus untuk bunga deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang disimpan dalam bentuk rupiah atau dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang ditempatkan

di Bank Indonesia. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku sejak 31 Desember 2018 (PMK 212/2018). Dengan terbitnya beleid ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 (PMK 26/2016) tidak berlaku lagi.

Aturan dalam PMK 212/2018 dimaksudkan agar eksportir menyimpan dananya di bank dalam negeri, sehingga neraca perdagangan Indonesia tetap terjaga stabilitasnya. Dengan terjaganya neraca perdagangan akan berimbas pada stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung penguatan perekonomian nasional.

Insentif untuk DHE yang Ditempatkan Kembali

Aturan dalam PMK Nomor 212/2018 menegaskan kembali bahwa penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto atas SBI yang sumber dananya dari DHE dan ditempatkan di Indonesia, dikenakan PPh yang bersifat final. Dibandingkan dengan PMK Nomor 26/2016, besaran tarif PPh final tidak berubah, tetapi pengenaannya disesuaikan

dengan jenis mata uang, jangka waktu penempatan DHE, serta instrumen investasi yang dipilih Wajib Pajak.

Dalam pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan, bunga dari deposito DHE dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di bank Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh bersifat final dengan tarif 10 persen dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif lebih rendah dikenakan apabila eksportir menempatkan dananya lebih lama. Tarif 7,5 persen dikenakan untuk deposito DHE dengan jangka waktu tiga bulan, tarif 2,5 persen dikenakan untuk deposito DHE dengan jangka waktu 6 bulan, dan tarif 0 persen dikenakan untuk deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Apabila eksportir mengonversi DHE dan menempatkan dalam bentuk rupiah, tingkat bunganya lebih rendah dibanding persentase tingkat bunga dalam dollar Amerika. Dalam pasal 5 ayat 1 huruf b disebutkan bunga dari Deposito DHE dalam mata uang rupiah yang ditempatkan di bank dalam negeri atau cabang bank asing di Indonesia dikenai PPh bersifat final dengan tarif 7,5 persen dari jumlah bruto untuk Deposito DHE dengan

Ilustrasi
A. Wirananda

jangka waktu 1 bulan, 5 persen untuk jangka waktu 3 bulan, dan 0 persen untuk deposito DHE dengan jangka 6 bulan atau lebih.

Hal berbeda yang diatur dalam PMK Nomor 212/2018 dibanding dengan aturan sebelumnya adalah pengenaan PPh final untuk bunga deposito khususnya deposito DHE yang ditempatkan kembali. Aturan berlaku pada saat jatuh tempo baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam PMK 26/2016, ketentuan mengenai pengenaan PPh final atas bunga dari deposito tidak berlaku dalam hal Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan kembali sebagai deposito, termasuk melalui mekanisme perpanjangan deposito.

Untuk deposito DHE berjangka, jika pencairan dilakukan sebelum masa jatuh tempo maka akan dikenakan tarif sebesar 20 persen dari nilai bruto, lebih tinggi atau sama dengan tarif PPh atas bunga deposito non- DHE. Atas kurang bayar PPh yang timbul karena kejadian ini akan dibebankan ketika pembayaran bunga deposito berikutnya atau ketika deposito dicairkan.

Pembebasan PPh Final

Dalam aturan ini diatur juga beberapa

kriteria bunga tabungan dan diskonto SBI yang terbebas dari pemotongan PPh final. Pembebasan pemotongan PPh final diberlakukan untuk penghasilan dari bunga tabungan dan diskonto SBI atas penempatan DHE yang dilakukan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) apabila memenuhi beberapa kriteria. Berdasarkan pasal 7, bunga tabungan dan diskonto SBI terbebas dari pemotongan PPh final apabila nilai bunga dan diskonto tidak melebihi Rp7,5 juta, bunga dan diskonto diterima/diperoleh bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia, bunga dan diskonto SBI yang diterima dana pensiun, dan bunga tabungan pada Bank yang ditunjuk pemerintah terkait kepemilikan properti sederhana dan sangat sederhana untuk dihuni sendiri .

Pemotong Pajak

Selain tarif PPh dan pembebasan PPh final, PMK 212/2018 juga mengatur mekanisme pembayaran PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto atas SBI akan dilakukan dengan cara pemotongan langsung. Dalam bunga deposito dan tabungan pemotongan akan dilakukan oleh bank yang membayarkan

bunga. Adapun untuk diskonto SBI, kewenangan untuk memotong PPh dipercayakan kepada Bank Indonesia (selaku penerbit SBI), Bank dan/atau Dana Pensiun yang mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjual kembali SBI kepada lembaga bukan bank atau Dana Pensiun yang pendiriannya yang belum disahkan Kementerian Keuangan atau OJK.

Penutup

Adanya aturan perbedaan tarif pajak yang diberikan kepada eksportir yang menyimpan DHE-nya dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk dollar AS kiranya bisa mendorong eksportir untuk menempatkan dana dari ekspor di bank dalam negeri. Adanya dua pilihan mata uang membuat pengusaha memiliki pilihan dan apabila terjadi fluktuasi nilai rupiah pengusaha memperoleh konversi risiko dalam insentif pajak yang ada. Aturan sejenis juga akan dibuat Kementerian Keuangan yaitu Insentif bagi DHE di sektor Sumber Daya Alam. Dengan adanya insentif fiskal tersebut diharapkan bisa memberikan daya ungkit ekonomi sehingga stabilitas terjaga.

Teks Budi Sulistyono



Selalu Ada Alasan untuk Terus Belajar

Fahmi Hendrawan berpose di depan koleksi lini busananya yang terdapat di *workshop* Fatih Indonesia

Foto
Resha A. Pratama

Membangun bisnis sendiri hingga sukses dan berkembang, bukanlah perkara gampang. Meski bisnisnya mulai membuahkan hasil, Fahmi tidak lupa pentingnya pendidikan formal. Melalui jalur beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),

Fahmi Hendrawan, pendiri Fatih Indonesia, menuntaskan pendidikan magister di bidang *Creative and Cultural Entrepreneurship* di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Fahmi berharap ilmu yang dia miliki bisa diterapkan pada bisnisnya, sehingga lebih berkembang dan membuka kesempatan kerja kepada lebih banyak orang. Apalagi, bisnis yang tengah dijalankannya membawa misi untuk mengembangkan budaya khas lokal ke mancanegara. Sejak awal mula dirintis, Fatih Indonesia *-brand* baju muslim yang diusung Fahmi- menawarkan baju koko berdesain batik asal Garut.

“Semua batik yang saya ambil berasal dari Batik Garutan yang ada di Jawa Barat. Saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan para pengrajin batik yang ada disana,” ungkap Fahmi. Tidak sampai di situ, Fahmi juga mempekerjakan langsung para penjahit dari Garut untuk

lpdp Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

dibawa ke Jakarta. Bahkan saat kali pertama dijalankan, Fatih Indonesia melibatkan sejumlah anak yatim piatu dalam proses pengemasan produknya. “Jadi untuk yang lipat baju, masuk-masukin ke plastik, itu anak yatim piatu,” kenang pemuda yang pernah berkariir selama lima tahun di salah satu bank nasional tersebut.

Kisah dibalik Fatih

Diakui Fahmi, Fatih Indonesia terinspirasi dari salah satu perintah Tuhan dalam ayat dalam Al-Quran, “*Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid.*” (QS. Al-Araf ayat 31).

Maka dari situ, ide bisnis baju koko bagi pria muslim mulai dipersiapkan. Hal pertama yang dilakukan Fahmi adalah belajar. Fahmi

mulai melakukan riset dengan mengamati secara langsung ke pasar tanah abang. Selanjutnya, ia mulai membuat *business plan*, melakukan analisa bisnis, dan keuangan. Fahmi juga terjun langsung dan bekerja selama dua bulan kepada tukang jahit di Mayestik, “Saya belajar bikin pola, *ngukur*, pilih-pilih kain, melayani *customer*, hingga angkut-angkut barang. Jadi benar-benar (belajar) dari *basic*,” kenangnya.

Puas belajar langsung, Fahmi mulai mencari pinjaman modal. Setelah menerima banyak penolakan, salah seorang kawan memercayakan modal usaha kepadanya. Atas restu sang ibu, Fatih Indonesia resmi diluncurkan pada Juni 2015.

Tiga tahun enam bulan setelah *saat* itu, kini perkembangan Fatih Indonesia begitu membanggakan. Omsetnya bernilai di atas Rp1 miliar per tahun dan mempekerjakan tidak kurang dari 20 orang pegawai. Selain itu, Fatih Indonesia juga telah banyak berpartisipasi dalam kegiatan *fashion show* di luar negeri. Terakhir adalah di Jepang melalui Tokyo Modest Fashion Show dan Japan Halal Expo. Kemudian Festival Indonesia di Moskow Rusia, serta Asia Islamic Fashion.

Harus sekolah lagi

Satu tahun lebih setelah mendirikan Fatih Indonesia, Fahmi mulai gusar. Kegusarannya tersebut oleh keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Disadari Fahmi, *background* pendidikan sarjananya tidak linier dengan apa yang dia geluti saat itu. Fahmi merasa belum cukup ilmu. Kursus, pelatihan, *workshop* dan seminar bisnis yang selama ini dia ikuti dirasa masih sangat kurang.

Kegusarannya memuncak manakala Fatih Indonesia mulai ikut serta dalam pergelaran Indonesia Fashion Week. Saat itu, perkembangan Fatih Indonesia sudah mulai menampakkan hasil.

“*I don't have any background* atau ilmu yang memadai,” tutur pemuda yang menamatkan pendidikan sarjananya di Institut Pertanian Bogor pada 2009 ini.

Fahmi mengaku, dalam menjalankan Fatih Indonesia, dirinya tidak ingin hanya sekadar berdagang, melainkan juga membangun sistem. “Sebab saya melihat Indonesia akan menjadi pusat *fashion* muslim pada 2020. Saat ini pun, negara luar sudah *concern* pada halal *lifestyle*. Jadi, potensinya besar *banget*,” jelasnya penuh optimisme.

Berburu beasiswa

Fahmi memutuskan ikut seleksi LPDP pada 2017. Bagi Fahmi, LPDP adalah salah satu lembaga beasiswa yang mumpuni. Dia juga meyakini memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos seleksi.

“Karena LPDP bukan hanya mencari penerima beasiswa, melainkan calon-calon pemimpin yang bisa berkontribusi untuk masyarakat, serta (mencari) generasi muda yang bisa jadi contoh baik untuk generasi muda lainnya,” tutur Fahmi. Di samping itu, Fahmi memperoleh informasi bahwa para *awardee* LPDP berkesempatan menjalin banyak koneksi setelah menjalani pendidikan.

Kepada Media Keuangan, Fahmi membagikan tips lolos seleksi LPDP. Pertama, jika memilih kuliah ke luar negeri, fokus pada IELTS. Kedua, LPDP mensyaratkan pembuatan esai mengenai kontribusi calon *awardee* di masyarakat dan mau jadi apa calon *awardee* ke depan. Maka menurutnya, buatlah esai yang meyakinkan namun tetap realistis. Ketiga, saat proses wawancara, yakinkan dengan visi misi yang dibawa. “Pewawancara juga akan melihat dan bisa merasakan. Jadi sampaikan dan jangan ada beban,” sarannya.

Kuliah sambil kerja

Fahmi perlu bolak balik Jakarta-Bandung selama menjalani masa perkuliahan di ITB. Mobilitas tinggi dan kepiawaian dalam mengatur waktu jadi tantangan tersendiri. “Pagi masuk kuliah, sore saya harus *meeting* ke Jakarta. Lalu malam saya harus balik lagi untuk *ngerjain* tugas,” kenang Fahmi. Meski demikian, Fahmi mampu menyelesaikan keduanya dengan baik.

Padatnya kegiatan dijalani Fahmi dengan

senang hati. “Kami diberikan kemudahan untuk bertemu dengan mentor yang sesuai bidang kami,” cerita Fahmi. Dari para mentor inilah, Fahmi banyak belajar pengalaman bisnis di lapangan. Maka, mengunjungi mentor selepas kegiatan perkuliahan jadi rutinitas yang tidak mau dia lewatkan. “Saya datang ke pabrik mereka (para mentor), saya lihatin sistemnya, prosesnya,” kenangnya lagi.

Mengambil peran

Lulus dari ITB, Fahmi berganti peran sebagai mentor bagi para mahasiswa. Tidak jarang, ia diundang sebagai dosen tamu di beberapa kampus lain, seperti Swiss German University dan Universitas Pakuan. Fahmi juga aktif di Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Jawa Barat. Dia dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai staf ahli gubernur. Tugasnya mendampingi Ibu Gubernur untuk mengembangkan potensi kerajinan yang ada di Jawa Barat, khususnya batik.

“Saya biasanya terjun ke beberapa daerah di Jawa Barat, *ngembangin* batik mereka, apa saja yang bisa digali dan apa saja yang perlu ditambah,” jelasnya. Berdasarkan safari yang dilakukan tersebut, Fahmi pun terinspirasi untuk mengangkat beragam jenis batik yang ada di Jawa Barat, selain Batik Garutan.

Ke depan, Fahmi ingin Fatih Indonesia tidak terbatas pada produksi baju koko. “Tetapi juga produksi *outfit* dari *head to toe* untuk kebutuhan muslim cowok. Mulai dari peci, sajadah, celana dan lain-lain”.

Di penghujung wawancara, Fahmi menitipkan pesan kepada mereka yang ingin dan sedang menuntut ilmu.

“Pertama, luruskan niat, utamanya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, percaya bahwa niat yang benar akan melancarkan jalan. Ketiga, ikut serta berkontribusi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Keempat, bangun sinergi dan koneksi minimal dari lingkungan sekitar. Kelima, selalu *update* informasi terkini,” pesannya.

Teks Farida Rosadi

BUTUH DATA PNBP?



Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue

Dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Foto
Anas Nur Huda
Ilustrasi
A. Wirananda

Di negara tropis, demam dengue merupakan penyakit menular yang menjadi masalah serius. Angka kejadiannya meningkat saat memasuki musim penghujan atau sekitar September-Maret. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* (sebagian besar) dan *Aedes albopictus*.

Demam dengue dan demam berdarah dengue (DBD) adalah *stage* penyakit yang berbeda, dipengaruhi gejala yang timbul dan hasil pemeriksaan penunjang pada pasien. Demam dengue ditandai dengan demam tinggi $>38^{\circ}\text{C}$ sepanjang hari, biasanya disertai nyeri kepala, nyeri di belakang mata, rasa tidak nyaman di seluruh otot sendi, dan lemas. Pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan bercak-bercak kemerahan akibat kebocoran plasma pembuluh darah di bawah kulit.

Sementara itu, DBD adalah bentuk lanjutan dari demam dengue yang tidak segera ditangani. Gejala yang ditimbulkan meliputi semua gejala pada demam dengue, disertai tanda pendarahan di bawah kulit

berupa bercak-bercak merah yang tidak hilang dengan meregangkan permukaan kulit. Selain itu, dapat ditemukan mimisan dan perdarahan di saluran cerna.

Virus Dengue memiliki beberapa jenis *serotype*, yakni DENV-1, DENV-2, DENV-3, dan DENV-4. Infeksi oleh salah satu jenis virus hanya memberikan imunitas pada jenis virus itu seumur hidup, tetapi tidak untuk jenis yang lain. Misal, jika seseorang terkena infeksi dengue jenis DENV-1, tubuhnya akan membentuk imun untuk DENV-1 saja. Hal inilah yang memungkinkan seseorang dapat terkena demam dengue atau DBD berulang.

Yang perlu diketahui, jika seseorang kembali terserang oleh virus tipe berbeda, gejala klinis yang timbul akan jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Pada hari ke-3 hingga 7 setelah gejala awal demam fase ini, penderita dapat menunjukkan tanda-tanda bahaya demam dengue yang bisa berakibat fatal hingga kematian.

Pencegahan Primer

Pencegahan terbaik untuk penyakit

ini adalah memberantas sebaran nyamuk *Aedes aegypti*. Kementerian Kesehatan telah menyosialisasikan gerakan *3M Plus*, yaitu mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, *plus* hindari gigitan nyamuk dengan memakai kelambu saat tidur atau memakai losion anti nyamuk.

Pencegahan Sekunder

Vaksin untuk virus dengue masih dalam tahap pengembangan. Pada Desember 2015, *World Health Organization* (WHO) telah mempublikasikan vaksin dengue pertama yang disetujui 20 negara dan kemudian digunakan di negara endemis DBD. Namun, pada November 2017 diperoleh data bahwa vaksin ini hanya efektif untuk orang yang sebelumnya pernah terinfeksi dengue. Vaksin ini tidak dianjurkan pada orang yang belum pernah terinfeksi sebab dapat menyebabkan gejala DBD yang diderita lebih parah. Jadi, vaksin ini bisa digunakan sebagai pencegahan sekunder oleh orang yang pernah menderita DBD saja.



Renungan

Yang Paling Bahagia

Foto
Resha Aditya

Suatu sore, hujan turun derasnya. Aku terjebak hujan dan tidak bisa pulang. Sambil menyodorkan payung hitam besar, seorang anak laki-laki penuh harap menawarkan jasa ojek payung. Aku menyambut dengan cepat, bergegas mengejar waktu agar segera sampai ke rumah. Kaki-kaki kecil berjalan menyusuri jalanan di tengah guyuran hujan. Dengan baju basah kuyup menahan kedinginan, sang bocah mengantarku menuju seberang.

Diakuinya, profesi ojek payung sudah dilakoni sejak tiga tahun lalu, saat ia duduk di kelas 3 sekolah dasar. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia sangat bersyukur. Uang tersebut digunakan untuk menyambung keperluan hidup di tengah ibu kota.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Dalam agama, bersyukur merupakan bentuk pengakuan seorang hamba atas nikmat

Sang Pencipta, dengan sikap rendah hati semata-mata untuk mengharap pahala dan keridaan-Nya. Terkadang, sebagai manusia seringkali kita lupa bersyukur. Sementara, kita baru menyadari berharganya suatu nikmat saat telah mengalami kehilangan.

Robert Emmons, seorang psikolog dari University of California, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang bersyukur mengalami perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Rasa syukur yang senantiasa dipupuk dalam diri seseorang akan memberikan dampak positif. Diantara dampaknya yaitu, senantiasa bersemangat dan ceria, lebih sabar, lebih sehat secara fisik, serta lebih tinggi dalam berdaya juang.

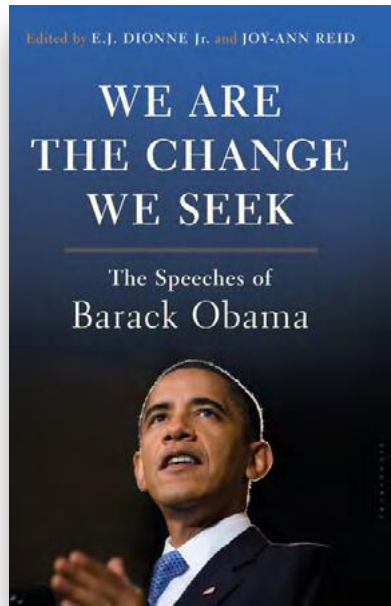
Secara psikologis, rasa syukur dapat memberikan kepuasan pada diri sendiri. Hal ini selanjutnya mampu menghilangkan perasaan resah ketika gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup dengan sudut

pandang positif. Hal ini juga membuat kita mengenali berbagai nikmat yang selama ini ada, seperti kelebihan, kekurangan, dan potensi diri. Dengan demikian, akan lahir kepercayaan diri, keberanian, dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup.

Setiap anugerah yang kita peroleh, sejatinya merupakan ujian untuk menentukan: apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Maka, sudah sepatutnya kita menjadi golongan orang yang bersyukur. Sebab, kebahagiaan tidak pernah datang dari luar. Juga bukan dari kekayaan, kepintaran, atau kemampuan yang hebat. Rasa bahagia berasal dari dalam. Dia lahir dari sikap hati orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi, mari kita benahi hati dan bersyukur atas setiap hal yang hadir, sehingga kita pun akan bahagia.

Teks Lutfiana Nadzroh

Buku



Mengenal Obama Lewat Kata

Judul:
We Are The Change We Seek:
The Speeches of Barack Obama
Editor:
E.J. Dionne Jr. dan Joy-Ann Reid
Tahun terbit:
2017
Dimensi:
384 Halaman

Buku ini dapat dibaca di:



Kompilasi. Kata tersebut sering kita temui beriringan dengan kata "album". Biasanya berisi kumpulan lagu-lagu terpilih dari seorang penyanyi yang mumpuni. Namun, apa jadinya jika yang dikompilasi adalah pidato-pidato pilihan dari seorang Barack Obama? Siapa yang tak kenal dengan Presiden Amerika Serikat pertama yang berasal dari keturunan *African-American* ini?

Buku ini berisi kumpulan pidato-pidato Obama selama periode 2002-2016. Presiden Obama memang dikenal sebagai negarawan yang cakap. Pidatonya selalu ditunggu oleh para pendukungnya. Bagai kayu bakar, kata demi kata yang diucapkan Obama mampu menjaga kobar semangat para pendengarnya. Tak heran jika pada tiap pidato yang disampaikannya, selalu saja ada *catchphrase* yang bisa dinukil atau kutipan yang bisa digemakan kembali oleh orator-orator lain sehingga bisa membius lebih banyak audiens.

"Yes, We Can!" sebuah frasa sederhana yang merupakan stanza penutup salah satu pidato yang

diberikan dalam rangkaian pencalonan dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat untuk pertama kali. Maknanya menggema ke penjuru negeri Paman Sam, dan beresonansi menyeberang samudera hingga pelosok dunia. Hebatnya, pidato tersebut diucapkannya bukan saat mengalami kemenangan, tapi memaknai kekalahan. Kalimat tersebut seakan menjadi jaminan untuk jutaan warga Amerika Serikat yang menitipkan mimpinya pada sosok yang mungkin akan memimpin mereka kelak. Begitu besar kekuatan frasa tersebut, sehingga dijadikan tema kampanye nasional sang calon presiden tersebut. Dan terbukti, itu mengantarnya terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-44.

Begitulah kekuatan kata-kata. Pilihan diksi dan intonasi ketika disampaikan oleh orang yang tepat akan berdampak besar. Namun jadi tantangan tersendiri ketika itu harus dituangkan ke dalam narasi. Harus dipikirkan bagaimana cara mengaduk emosi pembaca, seakan mereka bisa mendengar langsung pidato tersebut disampaikan. Untungnya, E. J. Dionne

Jr., dan Joy-Ann Reid, duo editor buku ini, membantu memberikan konteks yang pas pada tiap pidato terpilih. Pidato yang sebelumnya telah diseleksi secara hati-hati kemudian diberi judul menggugah yang didapat dari kutipan dalam pidato tersebut. Tak lupa, editor juga menyertakan pengantar yang menjelaskan kapan, di mana dan mengapa pidato tersebut disampaikan.

Membaca kumpulan pidato ini membuat kita paham kedalaman pemahaman Barack Obama dalam menjawab beragam isu kenegaraan. Lewat buku ini kita bisa melihat bagaimana Obama tak hanya menunjukkan kemampuan inteligensianya, namun juga emosi, simpati dan empatinya yang ia tunjukkan dalam pidato-pidatonya. Di sisi lain, buku ini seakan menjadi sebuah portal waktu. Membawa kita menilik kembali perjalanan karir seorang Barack Obama sejak menjadi senator, presiden hingga mengakhiri jabatannya sebagai sang pemimpin negara adidaya.

Peresensi Dimach Putra

Hidden Paradise di Pantai Lhoknga

Pantai Lhoknga merupakan salah satu tempat yang paling wajib dikunjungi jika berkunjung ke Banda Aceh. Terletak di Kabupaten Aceh Besar, tak jauh dari Kota Banda Aceh, pantai ini sangat populer di kalangan masyarakat, terutama para penggemar fotografi. Pantainya indah, putih, dan bersih. Melihat keindahan itu sembari berlari di tepian pantai adalah kenikmatan hakiki. Saat kita sedang terlarut dalam momen itu, semua masalah terasa hilang seketika.

Beberapa orang menyebut Banda Aceh sebagai *Second Paradise* di Indonesia setelah Bali. Ini lantaran pantai-pantai yang ada di sana memang elok, tak kalah dengan pantai lain yang terkenal di Indonesia. Tepat di sisi-sisi pantai Lhoknga terdapat batu-batu karang yang menarik untuk dijadikan objek foto. Itu sebabnya para penggemar fotografi banyak yang mampir mengunjungi pantai ini. Selain batu-batu karang di sisi-sisi pantai, terdapat pula batu besar di tengah-tengah pantai yang akan tampak begitu cantik sewaktu pancaran sinar matahari tepat mengenainya. Pada detik itu, kita seakan dibawa ke sebuah tempat lain yang begitu sejuk, nyaman, dan tenang.

Saat menyambangi pantai Lhoknga,

kita juga bisa memperoleh makanan dan minuman dalam kisaran harga yang tidak terlampau mahal. Cukup mengeluarkan uang Rp5.000, kita sudah dapat menyeruput secangkir kopi khas Aceh. Jika di pantai lain banyak terdapat sajian es kelapa segar, di pantai Lhoknga justru kopi Aceh yang makin menambah kenikmatan berwisata.

Biaya masuk ke pantai ini tidaklah mahal. Sebelumnya, untuk masuk ke pantai ini digratiskan, tetapi sejak tahun 2019 dipatok biaya masuk sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Namun, biaya tersebut hanya dimaksudkan untuk tarif parkir kendaraan bermotor, bukan tarif per pengunjung pantai yang masuk. Cara menuju lokasi pantai Lhoknga juga cukup mudah. Jika tidak memiliki kendaraan atau teman di Banda Aceh, kita bisa menyewa mobil di kota itu. Lalu pergilah ke arah pantai barat, atau buka aplikasi *maps* lalu ketik Lhoknga. Lokasi pantai ini dapat kita temukan saat melewati Jalan Lintas Barat Aceh.

Warga sekitar pantai selalu ramah serta murah senyum. Mereka justru yang meminta para fotografer untuk mengabadikan momen keindahan pantai. Alasannya simpel, mereka ingin dunia luar mengetahui *Hidden Paradise* yang ada di

Aceh. Dengan demikian, Pantai Lhoknga kebanggaan mereka akan makin populer sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk datang berkunjung.

Last but not least, karena ini di Aceh, terdapat aturan-aturan tertentu yang perlu diketahui oleh pengunjung pantai, misalnya aturan pembatasan jam. Dalam hal ini, waktu mengunjungi pantai Lhoknga dibatasi sampai sebelum azan magrib atau sekitar jam setengah tujuh malam. Daerah yang mendapat julukan Serambi Mekkah ini memang selama ini menerapkan aturan-aturan tertentu yang berbeda dibanding daerah lain.

Pemerintah daerah Aceh telah membuat pengumuman tentang jadwal mengunjungi pantai. Namun, pengumuman itu bersifat pemberitahuan saja. Apabila kalian tetap ingin bermain di pinggir pantai Lhoknga sampai jam berapa pun kemungkinan tidak masalah. Akan tetapi, saat azan magrib mulai berkumandang, pantai ini berubah menjadi sunyi. Para pedagang serta masyarakat sekitar sudah tidak terlihat lagi. Jadi, apakah kalian masih berani?



Pantai Loknghha

Teks dan foto Habibullah Yusyaf,
pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tips Menghadang Investasi Bodong ala Millenials

Zaman dahulu ketika awal bekerja, saya tertarik untuk membeli paket investasi yang dikenal melalui portal online. Setelah mendapat beberapa kali bagi

hasil, ternyata investasi tersebut kandas juga pada akhirnya. Untungnya, modal yang saya kucurkan telah kembali ketika investasi tersebut bermasalah. Ironisnya banyak korban lain yang modalnya masih “nyangkut”. Beberapa kali tertipu investasi, sebenarnya melatih alam bawah sadar kita untuk menelisik mana jenis investasi yang masuk dalam kategori ‘maknyus’ atau kategori investasi ‘abal-abal’.

Kali ini kita akan mengulas cara menghindari jeratan investasi bodong. Lalu, apa sih definisi dari investasi bodong itu? Anda bisa mencari dari banyak referensi, namun pada dasarnya semua investasi memiliki potensi menjadi investasi bodong. Contohnya, dalam investasi emas terdapat perusahaan yang bernama Virgin Gold Mining Corp (VGMC) yang telah masuk dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di bidang agrobisnis ada Koperasi Langit Biru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ratusan investasi bodong ini memiliki satu persamaan yang menjadi dasar kita semua dalam berinvestasi, yaitu “too good to be true”.

Kemudian, bagi kaum *millenials* yang baru mengenal investasi muncul pertanyaan terkait cara agar tidak terjebak investasi bodong. Sejarah membuktikan bahwa pengalaman selalu menjadi pelajaran terbaik. Mau pengalaman Anda sendiri ataupun orang lain, tetap bisa diambil manfaatnya. Nah, ada beberapa tips yang bisa diaplikasikan agar terhindar dari investasi bodong.

Pertama, hindari 2 variabel. Kedua variabel itu telah disinggung di atas, yakni “too good to be true (TGTBT)” ditambah dengan “keserakahan”. Kata seorang psikolog, faktor TGTBT akan memicu “keserakahan” pada diri manusia. Dari segi ilmu ekonomi, tidak akan ada sebuah instrumen investasi wajar yang akan menawarkan bagi hasil yang sangat tinggi dengan risiko yang

hampir nihil. Misalnya saja, investasi Rp100 juta, menjanjikan return Rp 40 juta hanya dalam 2 minggu. Bahkan ketika membuka bisnis sendiri, sangat sedikit yang bisa memberikan 40 persen dalam waktu sependek itu, apalagi skema bagi hasilnya.

Lakukan precheck. Jika investasi tersebut dirasa wajar sehingga tidak cukup untuk menimbulkan keserakahan dalam diri Anda, maka Anda bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Berhubung zaman sudah maju, sebelum menanamkan modal cek dahulu nama perusahaan melalui internet untuk mengetahui rekam jejak dan validitasnya. Selain mengecek di situs resmi pemerintah, mesin pencari (*search engine*) juga akan banyak menampilkan testimoni permasalahan jika perusahaan tersebut pernah mengeluarkan investasi bodong.

Apabila investasi tersebut berjenis kepemilikan emas, properti, tekstil, atau industri lainnya, maka sangat disarankan untuk cek secara fisik. Cek fisik bisa berupa cek lokasi riilnya maupun cek ketersediaan barangnya.

Jangan lupakan fungsi legalitas. Anda akan sangat bijak apabila sebelum memutuskan membeli sebuah produk terlebih dulu mencari penasihat hukum (*lawyer*) untuk meminta pendapat hukumnya. Titik inilah yang jarang diaplikasikan masyarakat kita. Penasihat hukum sering baru difungsikan jika muncul permasalahan. Padahal, sejatinya mencegah akan lebih baik daripada mengobati.



Andhika Diskartes,
Financial Planner

Mas Praim

“DIET STARTS TOMORROW”

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





HARI AIR SEDUNIA
22 MARET 2019

Foto: Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA